

IIS Research Monograph Series

No Man's Land No Longer:

Kontestasi Sumber Daya dan Geopolitik
di Kawasan Arktik

Wendi Wiliyanto

Anggita Fitri Ayu Lestari

Tria Nadila Desanti Margono

Cornelia Laras Gigih Kineta

IIS Research Monograph

No Man's Land No Longer: Kontestasi Sumber Daya dan Geopolitik di Kawasan Arktik

No.7/2024

Penulis:

Wendi Wiliyanto
Anggita Fitri Ayu Lestari
Tria Nadila Desanti Margono
Cornelia Laras Gigih Kineta

Editor:

Luqman-nul Hakim

Tata Letak:

Albert Nathaniel

Ilustrator:

Dian Adi MR

© 2024 Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

ISSN 2808-5221

Diterbitkan oleh:

Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada

Alamat Penerbit:

Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
iis.fisipol@ugm.ac.id

No Man's Land No Longer: Kontestasi
Sumber Daya dan Geopolitik di Kawasan Arktik



Pengantar

Bermula dari hamparan es yang luas, Arktik kini bertransformasi menjadi kawasan strategis dan kaya akan sumber daya yang diperebutkan. Arktik menyimpan cadangan minyak, gas alam, dan mineral yang semakin dapat diakses akibat mencairnya es. Kekayaan sumber daya ini meningkatkan nilai strategis kawasan sehingga memicu pergulatan negara-negara dan korporasi dalam klaim hak serta investasi. Secara geopolitik, Arktik memiliki arti strategis, utamanya jalur pelayaran baru dan pertahanan militer. Perubahan ini tidak hanya mengubah dinamika perdagangan global, tetapi juga mendorong negara-negara untuk memperkuat kehadiran militer dan politik demi mengamankan klaim teritorial.

Alih-alih sebagai kawasan terabaikan, Arktik telah menjadi pusat perhatian dunia. Pergeseran paradigma ini senyatanya membongkar dinamika kawasan Arktik yang dikonstruksi berdasarkan interaksi dan kepentingan ekonomi, politik, serta keamanan. Implikasinya, kawasan ini menjadi arena pergulatan berbagai negara dari tiga benua—Eropa, Amerika, dan Asia—yang sedang berlomba untuk memperluas pengaruh serta mengamankan kepentingan nasional.

Akselerasi pergulatan antarnegara di kawasan Arktik berlangsung dalam perubahan tata dunia sering disebut oleh para akademisi sebagai *New Cold War*. Yakni sebuah istilah yang menggambarkan kebangkitan kembali ketegangan geopolitik dan rivalitas antara kekuatan besar di era pasca-Perang Dingin. Kontestasi ini tercermin dari adanya intensifikasi militerisasi kawasan Arktik oleh berbagai aktor, seperti NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan Rusia-China yang saling memperkuat militer di wilayah strategis tersebut. Potensi konfrontasi militer tentu menjadi salah satu implikasi utama. Dalam jangka panjang, dinamika ini berpotensi mengubah tatanan global melalui pembentukan aliansi yang semakin terpolarisasi. Hal ini misalnya terlihat dalam keputusan Finlandia dan negara-negara Nordik, yang sebelumnya relatif netral dan tidak tertarik melakukan militerisasi, untuk bergabung dengan NATO. Keseluruhan dinamika pergulatan geopolitik ini tentu bermuara pada keberlangsungan hidup masyarakat adat Arktik. Pemain besar di kawasan ini sering memandang Arktik sebagai kawasan yang seolah-olah tak berpenghuni dan layak untuk dikuasai. Implikasinya, masyarakat adat Arktik kerap diperlakukan sebagai subjek pasif sehingga aspirasi dan advokasi mereka tidak mendapatkan perhatian yang substansial dalam pengambilan keputusan. Dengan berbagai tekanan terhadap pergulatan

geopolitik dan kontestasi sumber daya antarnegara, masyarakat adat secara simultan menemukan cara untuk turut terlibat aktif dalam dinamika tersebut.

IIS Research Monograph edisi ini menjelaskan dinamika reposisi Arktik dari kawasan yang terabaikan menjadi arena pergulatan geopolitik. Dengan menggunakan lensa makro-historis, kajian ini akan melihat dinamika Arktik dalam tiga konteks diskursif besar: (1) kolonialisme hingga Perang Dingin, (2) Pasca-Perang Dingin, dan (3) tata dunia pasca-unipolar.

Bagian pertama, Arktik dalam Lintasan Sejarah: Dominasi dan Perlawanan, berfokus pada lanskap historis tata kelola Arktik, seperti pengembaraan sejarah, perlawanan masyarakat adat, serta implikasi Perang Dunia dan Perang Dingin terhadap dinamika Arktik. Sementara itu, tema kedua yang bertajuk Arktik Pasca-Perang Dingin: Dari Isu Keamanan Tradisional ke Keamanan Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi mendiskusikan dinamika Arktik yang tidak lagi dilihat melalui kaca mata keamanan tradisional dan upaya menjadikan Arktik sebagai ruang kolektif – bukan kontestasi. Periode ini kerap dilabeli sebagai “Arktik Baru.” Pada era ini, negara-negara Asia, termasuk Indonesia, mulai terlibat dan memproyeksikan kepentingan dan pendekatannya terhadap kawasan Arktik. Pada bagian ketiga, Menuju Tata Dunia Pasca-Unipolar: Dari Ruang Kolektif ke Polarisasi Politik dan Potensi Konfrontasi Militer, mengeksplorasi transformasi tata kelola Arktik yang tidak lagi dimaknai sebagai area ‘zone of peace’ dan ruang kolektif. Transformasi tata kelola di Arktik menunjukkan pergeseran semangat multilateralisme menuju kontestasi yang intens. Di tengah dinamika ini, perhatian terhadap masyarakat adat seringkali terabaikan.

Sebagai epilog, edisi ini akan dikunci dengan kajian yang berpusat pada masa depan Arktik dalam tema yang bertajuk Arktik di Persimpangan: Dominasi, Ekstraktivisme, dan Harapan Inklusif. Kajian ini akan menginternalisasikan pendekatan kritis sekuritisasi dan navigasi masa depan Arktik di tengah polarisasi politik serta potensi konfrontasi militer.

this is my life
I am a part of nature
I feel I know
The yoik in wind
The bird's singing in summer night

Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001)
- Saami artist

Daftar Isi

Pengantar.....	(i)
Daftar Isi.....	(iv)
Arktik dalam Lintasan Sejarah: Dominasi dan Perlawanan.....	1
Dari Bongkahan Es Menjadi Negara-Bangsa.....	2
Eksplorasi, Perang, dan Perlawanan.....	7
Perang Dingin yang Membuat Arktik Memanas.....	11
Arktik Pasca-Perang Dingin: Dari Isu Keamanan Tradisional ke Keamanan Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi.....	19
Mewujudkan Arktik sebagai 'Zone of Peace'.....	20
Arktik sebagai Ruang Kolektif.....	26
Arktik sebagai Pusat Perhatian Baru Asia.....	33
Cina: Pendekatan Multidimensional dan Proyek <i>Polar Silk Road</i>	33
India: Pendekatan Narasi Perubahan Iklim.....	36
Singapura: Pendekatan Komersialisasi dan Kompetensi Teknologi.....	39
Jepang: Pendekatan Kapabilitas Lembaga Penelitian.....	42
Korea Selatan: Kompetensi Teknologi dan Lembaga Penelitian.....	46
Indonesia: Minimnya Proyeksi Kepentingan di Arktik.....	49
Menuju Tata Dunia Pasca-Unipolar: Dari Ruang Kolektif ke Polarisasi Politik dan Potensi Konfrontasi Militer.....	55
Arktik dan Tata Dunia Pasca-Unipolar: Skenario Masa Depan Arktik.....	56
<i>Scramble for Arctic</i>	56
Arktik sebagai 'Zone of Peace,' Masihkah?.....	61
Masyarakat Adat yang Selalu Terpinggirkan.....	63
Arktik di Persimpangan: Dominasi, Ekstraktivisme, dan Harapan Inklusif.....	65
Menyongsong Masa Depan Arktik.....	66
Referensi.....	68

Arktik dalam Lintasan Sejarah: Dominasi dan Perlawanan

Dari Bongkahan Es Menjadi Negara-Bangsa

Arktik merupakan kawasan di Kutub Utara Bumi yang berada dalam Lingkaran Arktik, tepatnya di sekitar 66° 34' lintang utara. Lingkaran Arktik meliputi Samudra Arktik yang dikelilingi oleh daratan bagian utara negara-negara Nordik (Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia), utara Rusia (termasuk Siberia), Greenland (Denmark), utara Kanada (termasuk Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut), dan utara Amerika Serikat (Alaska). Kondisi iklim di kawasan ini sangat dingin, di mana suhu dapat turun di bawah titik beku sepanjang tahun hingga membekukan hampir seluruh perairan Arktik. Namun, dalam beberapa dekade mendatang, es di Arktik diperkirakan akan mencair sepenuhnya. Fenomena mencairnya es di Arktik tidak hanya dianggap sebagai ancaman perubahan iklim, tetapi juga dipandang sebagai peluang ekonomi yang menjadi ajang kontestasi bagi negara *superpowers*. Lantas, seperti apa masa depan kawasan Arktik?

Selama periode glasial, wilayah Arktik tertutup oleh lapisan es yang tebal. Sekitar 10.000 tahun lalu, lapisan es tersebut mulai mencair sehingga membentuk lanskap baru yang lebih layak huni. Pada periode ini, manusia menjalani kehidupan semi-nomaden dengan berburu, mengumpulkan makanan, dan memproduksi alat-alat dari batu. Karenanya, periode ini sering disebut sebagai zaman batu. Kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian berkembang menjadi komunitas yang dikenal sebagai masyarakat adat. Meskipun persebarannya tidak pasti, Arctic Centre University of Lapland (2010) mengidentifikasi beberapa suku yang diperkirakan telah bermukim di wilayah Arktik sejak zaman es mencair, termasuk suku Sámi di wilayah Finlandia, Swedia, Norwegia dan Rusia Barat Laut; suku Nenet, Khanty, Evenk dan Chukchi di Rusia; suku Aleut, Yupik, Alutiiq, Dene, Gwich'in, dan Athabaska di Amerika Utara; serta suku Inuit yang tersebar di seluruh wilayah Arktik, mulai dari Chukotka (Rusia), Alaska (Amerika Serikat), Kanada, hingga Kalaallit Nunaat (Greenland), yang kemudian direpresentasikan sebagai konsepsi Inuit Nunangat (Tanah Air Inuit) (Saami Council & German Arctic Office at the Alfred Wegener Institute, 2021).



Setidaknya, terdapat dua premis mengenai asal usul keberadaan masyarakat adat. **Pertama**, masyarakat adat merupakan *homo sapiens* yang berevolusi di kawasan Afrika atau Asia yang kemudian bermigrasi ke kawasan Arktik (Probotrianto, 2021). Gelombang migrasi ke Arktik diperkirakan terjadi pascabanjir di Jembatan Tanah Bering hingga menghasilkan orang-orang Eskimo, Aleut, dan Chipewyan yang berbahasa Na-Dene (Dodds & Nuttall, 2019). **Kedua**, masyarakat adat merupakan *homo sapiens* di wilayah Arktik yang berevolusi secara fisik dan budaya untuk memenuhi tuntutan lingkungan ekstrem (Probotrianto, 2021). Contohnya, seperti suku Inuit yang merupakan keturunan Thule, yaitu kebudayaan yang berkembang selama iklim optimum pada sekitar 900-1100 SM.

Asal usul masyarakat adat masih diperdebatkan, tetapi satu hal yang pasti adalah mereka telah hidup berdampingan dan membangun budaya regional yang kaya dan kompleks jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa (Dodds & Nuttall, 2019). Di tengah kondisi iklim yang ekstrem, mereka berhasil bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Mereka mengembangkan inovasi, seperti perahu kulit anjing laut, kayak, dan kereta luncur anjing untuk menjelajahi wilayah lain serta menciptakan pakaian dari bulu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dingin. Sumber daya alam yang melimpah di Arktik, seperti bulu, ikan, lemak ikan paus, air tawar, dan hutan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Seiring berjalannya waktu, penjelajah Eropa menemukan kekayaan ini dan mulai menunjukkan ketertarikan, terutama ketika minyak, gas, serta mineral semakin banyak ditemukan pada abad ke-19 (Standlea, 2006). Hal ini menandai dimulainya era eksplorasi Eropa dalam sejarah Arktik.

Eksplorasi pertama Eropa di Arktik dimulai oleh petualang Yunani bernama Pytheas untuk melihat bongkahan es yang mengapung (McGhee, 2005). Namun, tulisan mengenai Arktik lebih banyak memulai era ini pada abad ke-9, ketika bangsa Nordik berlayar meninggalkan Skandinavia menuju Greenland. Alih-alih menjarah, mereka justru membangun komunitas dan jaringan perdagangan. Namun, kondisi cuaca yang kembali ekstrem dan

ketidakmampuan untuk beradaptasi memaksa mereka meninggalkan Greenland (Doods & Nuttall, 2019).

Pada abad ke-15, eksplorasi Eropa di Arktik dimulai kembali. Penjelajahan ini didorong oleh berbagai motivasi, seperti motivasi agama, kepentingan nasional, dan ambisi pribadi, yang kemudian dikenal sebagai semangat Eurosentrisme. Salah satu karakteristik utama dari semangat ini adalah dorongan untuk melakukan kolonisasi. Implikasinya, penjelajah yang berhasil menemukan dan menguasai wilayah baru, dalam konteks ini Arktik, akan dihargai dengan status yang tinggi ketika mereka kembali ke tempat asal mereka (McGhee, 2005).

Pada abad ke-16, ketika perdagangan Eropa berkembang secara masif, motivasi penjelajah Eropa meluas ke aspek ekonomi dan teknologi. Mereka mulai mencari rute perdagangan baru yang dikenal sebagai *the Northwest Passage* (NWP). Rute ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui kepulauan di utara Kanada Arktik. Penjelajah seperti, John Cabot dan Martin Frobisher, berusaha menemukan rute untuk mencapai wilayah Asia lebih cepat. Mereka berharap menemukan jalur yang lebih pendek dan aman dibandingkan dengan rute melalui selatan Amerika atau Tanjung Harapan di Afrika. Namun, es yang masih tebal dan berbahaya sering menjebak kapal-kapal mereka sehingga selama berabad-abad belum ada penjelajah yang berhasil memetakan rute perdagangan tersebut (Dittmer et al., 2011).

Pada abad ke-17 hingga ke-18, kekuatan besar, seperti Prancis, Inggris, Denmark-Norwegia, serta Kekaisaran Rusia turut memasuki wilayah Arktik, mengklaim dan memperjualbelikan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Prancis berfokus pada perdagangan bulu (Francis & Morantz, 2014) dan ekspedisi udara (Simon-Ekeland, 2024), sementara Inggris terlibat dalam eksplorasi ilmiah dan perdagangan (Miller, 2019). Denmark-Norwegia, di bawah pimpinan Hans Egede, menandai ketertarikan baru terhadap Greenland dengan berfokus pada pengambilan keuntungan dari ekonomi perburuan penduduk asli, tanpa menimbulkan konflik yang berarti (Hyde, 1933). Mereka kemudian membangun Royal Greenland Trade Company yang



memegang monopoli perdagangan dari tahun 1774 hingga awal 1950-an, mengambil keuntungan dari perburuan paus, penyegelan, dan penambangan kriolit (Mikkelsen & Langhelle, 2008).

Selain itu, Kekaisaran Rusia juga menjelajahi Arktik dengan tujuan awal mencari sumber daya alam berharga, seperti bulu untuk membuat pakaian dan gading untuk membuat perhiasan. Memasuki abad ke-19, Rusia menemukan mineral yang diyakini dapat mereka gunakan untuk memperkuat ekonominya. Upaya tersebut ditunjukkan melalui inisiasi mereka untuk meluncurkan kapal pemecah es kutub pertama di dunia, mendirikan Murmansk sebagai salah satu pusat kota terbesar di Rusia Utara, dan membujuk orang-orang agar pindah ke Kutub Utara (Josephson, 2014). Mereka juga membangun infrastruktur di wilayah tersebut untuk memperkuat keamanan dan mengembangkan sumber daya alam, yang dianggap sebagai kepentingan nasional (Probotrianto, 2021).

Terjadinya pergeseran kepentingan di wilayah Arktik inilah yang menandakan masuknya tata kelola pemerintahan bangsa Eropa. Hal ini mengakibatkan imaji terhadap kehidupan masyarakat adat mulai mengabur sebab praktik perdagangan, perburuan, dan ekstraksi sumber daya yang diinternalisasikan secara struktural mengubah cara hidup tradisional masyarakat adat. Misalnya, di Alaska bagian utara, komersialisasi mengakibatkan masyarakat adat terjebak dalam ekonomi pasar, alkohol, dan penyakit (Stuhl, 2016). Di Inuit Kanada, mereka meninggalkan gaya hidup nomaden dan beralih menjadi pemukiman permanen untuk mendukung klaim kedaulatan Kanada, di mana mereka menjadi tergantung pada kesejahteraan pemerintah (Hamilton, 1994).

Migrasi untuk melintasi jalur nomaden tradisional tidak lagi bisa dilakukan oleh masyarakat adat karena adanya batas negara-bangsa (Plaut, 2012). Hal ini semakin mengaburkan signifikansi masyarakat adat terkait perannya dalam membentuk dinamika Arktik, yang sejak hadirnya Eropa berhasil mendegradasi eksistensi serta nilai budaya masyarakat adat Arktik (Pelaudeix, 2012). Implikasinya, terjadi dominasi pengetahuan yang

mengakibatkan masyarakat adat kesulitan untuk melakukan perlawanan terhadap sistem struktural yang telah Eropa bangun. Karenanya, pemetaan terhadap masa depan Arktik yang semula merupakan entitas terabaikan hingga menjadi arena pergulatan oleh berbagai negara melahirkan urgensi eksplorasi secara kritis.



Eksplorasi, Perang, dan Perlawanan

Eksplorasi Eropa pada kawasan Arktik nyatanya tidak sekadar berorientasi pada penyelidikan mendalam terhadap potensi jalur perdagangan yang menghubungkan daratan Asia, Eropa dan Amerika serta sumber daya alam. Lebih dari itu, keberadaan Eropa memberikan pengaruh besar dalam lanskap tata kelola pemerintahan yang dibentuk dari pengalaman pembentukan negara bangsa Eropa. Oleh karenanya, penting untuk menelusuri kembali dinamika politik Arktik pada masa eksploitasi besar-besaran oleh bangsa Eropa.

Praktik replikasi negara bangsa di Arktik dapat dipetakan dalam beberapa aspek, salah satunya rekayasa sosial demografi (Laruelle, 2019). Eksplorasi bangsa Eropa di Arktik berimplikasi terhadap rekonfigurasi demografi kawasan. Kedatangan bangsa Eropa dalam jumlah besar di Arktik berhasil mengubah struktur demografi, di mana hanya terdapat 10% masyarakat adat yang tinggal di sana. Selebihnya adalah bangsa baru, para pendatang Eropa (Laruelle, 2019). Perubahan demografis ini berimplikasi pada perubahan besar dalam lanskap sosial, kultural, politik, dan ekonomi. Ini dapat dilihat dalam proses diseminasi dan internalisasi nilai-nilai Eropa melalui agenda misionaris sejak abad ke-15.

Agenda misionaris ini diyakini oleh Nikolaev (2011) dan Petterson (2014) sebagai instrumen strategis dalam proses transformasi dan kontrol budaya serta cara hidup masyarakat adat Arktik (Jensen, 2016). Pada akhirnya, proses sosial ini memfasilitasi penetrasi kuasa dan eksploitasi kawasan di Arktik. Namun, proses penundukan dan penyeragaman tersebut tidak pernah total. Pada akhirnya, ia menciptakan benih-benih perlawanan dari masyarakat.

Eksplorasi bangsa Eropa di Arktik didorong oleh keserakahan ekonomi. Ekspansi kapitalisme dan penundukan Arktik didasari oleh penguasaan sumber daya: minyak, mineral, perburuan paus dan komersialisasi bulu hewan dalam industri adibusana (Hamilton, 1994). Lebih lanjut, konstruksi imaji *state oil* oleh bangsa Eropa membentuk identitas Arktik sebagai pusat produksi minyak. Implikasinya, proses eksploitasi sumber daya alam atas nama modernisasi dan industrialisasi tidak terhindarkan. Fenomena ini

ditunjukkan oleh, misalnya, berkembangnya perusahaan ekstraksi minyak, salah satunya di Norwegia (Körber et al., 2017).

Industrialisasi masif ini menjadi ancaman bagi masyarakat adat Arktik, yang menempatkan alam sebagai sumber kehidupan yang perlu dijaga (Stotts, 2017). Tidak hanya pada lanskap sosial-ekonomi, dinamika besar di kawasan Arktik juga berlangsung dalam aspek keamanan geopolitik, terutama dalam pergulatan kekuasaan dalam Perang Dunia, khususnya Perang Dunia II dan Perang Dingin. Nilai strategis Arktik menjadikannya sebagai arena kontestasi karena, misalnya, menjadi jalur penting dalam distribusi persenjataan.

Nilai strategis tersebut dapat diidentifikasi melalui berbagai peristiwa krusial. **Pertama,** Arktik menjadi prominen dalam konstelasi militerisme ketika Jepang berhasil menduduki Pulau Attu dan Kiska, kawasan lepas pantai Alaska pada tahun 1942. Implikasinya, Alaska sebagai area perbatasan Amerika Serikat mengalami guncangan (Townsend & Kendall-Taylor, 2021). Secara sadar, proses perebutan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat menandai keterlibatan Arktik dalam Perang Dunia II. Singkat cerita, Amerika Serikat bersama Kanada berhasil merebut kembali pulau tersebut pada tahun 1943 (Townsend & Kendall-Taylor, 2021).

Kedua, identitas Arktik dikonstruksi sebagai area transportasi perang bagi Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Maksudnya, Arktik menjadi kawasan strategis dalam proses distribusi aneka amunisi perang. Model tersebut ditandai dengan program pinjam-sewa (*Lend-Lease program*), di mana Amerika Serikat dan Inggris berhasil mendistribusikan 27% amunisi kepada Uni Soviet melalui rute Laut Utara Arktik (Krasnozhenova et al., 2020). Namun, konsekuensi akhir dari komodifikasi kawasan Arktik sebagai arena Perang Dunia II berorientasi pada sejumlah dampak disruptif terhadap keberlanjutan lingkungan Arktik.

Proses distribusi pasokan militer oleh Amerika Serikat dan Inggris kepada Uni Soviet tentu berpotensi mengalami gangguan akibat serangan Jerman. Permasalahannya, serangan tersebut tidak hanya mendisrupsi proses distribusi, tetapi juga merusak infrastruktur kawasan Arktik. Ini terjadi pada



tahun 1941, di mana Amerika Serikat memperoleh serangan bom oleh Jerman pada saat mengirimkan pasokan perang ke Uni Soviet (Krasnozhenova et al., 2020). Bahkan, ekspansi pelabuhan oleh Uni Soviet untuk mengakomodasi pasokan perang dari aliansi turut berdampak pada kerusakan struktur es di kawasan Arktik (Krasnozhenova et al., 2020).

Tidak dapat dimungkiri bahwa konstruksi imaji oleh Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet senyatanya telah mengubah identitas Arktik sebagai kawasan pergulatan di antara kepentingan pihak eksternal dan masyarakat adat. Eksplorasi masif sumber daya yang mendorong pergulatan senjata mendorong hadirnya perlawanan masyarakat adat terhadap dominasi pihak eksternal.

Kawasan Arktik bukan ruang hampa yang apolitis. Dominasi bangsa-bangsa eksternal dalam hal ekonomi dan keamanan, melahirkan benih perlawanan yang dilakukan masyarakat adat. Dalam lanskap historis, dominasi identitas bangsa Eropa, eksploitasi ekonomi, dan pertarungan kekuasaan telah menihilkan signifikansi keberadaan masyarakat adat Arktik.

Salah satu bentuk awal perlawanan masyarakat adat Arktik dapat ditelusuri melalui sejumlah pergerakan nirkekerasan. Salah satu yang paling fenomenal adalah proses negosiasi perjanjian bersama Kerajaan Kanada atas kependudukan dan eksploitasi sumber daya oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-19. Inisiasi pergerakan tersebut hadir sebagai respons kolektif masyarakat adat atas disrupsi kapasitas ekonomi dan ruang hidup masyarakat adat. Negosiasi dan perlawanan tersebut dicapai melalui Perjanjian Delapan (8) 1899 dan Perjanjian Sebelas (11) 1921 (Hamilton, 1994).

Dalam proses negosiasi ini, terdapat aneka hak yang diperjuangkan oleh masyarakat adat Arktik, beberapa di antaranya berpusat pada lahan, sumber daya, dan pemerintahan otonom (Government of Northwest Territories, n.d.). Walaupun strategi nirkekerasan menjadi opsi utama dalam aksi perlawanan, pendekatan tersebut belum membuahkan hasil. Perjanjian Delapan (8) 1899 dan Perjanjian Sebelas (11) 1921 yang diharapkan menjadi titik pijak kemerdekaan atas tanah dan kultur bagi masyarakat adat Arktik, nyatanya tidak berdampak signifikan.

Perjuangan perlawanan masyarakat adat tetap dilakukan sebagai tanda ketidaksepehahaman ide terhadap imaji dominan *a la* bangsa Eropa dan beberapa negara yang menduduki Arktik. Perjuangan tersebut tampak jelas pasca-perang Eropa. Ini dapat ditelusuri melalui kemunculan aneka pergerakan masyarakat adat pada tahun 1960-an. Bahkan, kelompok Sámi—masyarakat adat yang mendiami kawasan Finlandia, Norwegia, Sweden, dan Rusia—membentuk *Nordic Saami Council* sebagai simbol perlawanan terhadap aneka bentuk penundukan (Toivanen, 2019). Semangat yang selalu dipelihara oleh *Nordic Saami Council* berpusat pada perjuangan hak masyarakat Sámi untuk memperoleh rekognisi atas hak budaya, politik, ekonomi, dan sosial (The Saami Council, n.d.).

Nordic Saami Council merupakan salah satu titik tumpu perjuangan hak masyarakat adat di berbagai kawasan Arktik. Bahkan, masifnya narasi perjuangan esensi hak asasi manusia pada tahun 1950-1960-an (Toivanen, 2019) turut menjadi momentum instrumen perlawanan strategis bagi masyarakat adat Arktik untuk melakukan reposisi eksistensi masyarakat adat dalam tata kelola pemerintahan Arktik pasca-perang.

Aksi perlawanan atas okupasi bangsa Eropa juga dapat dilacak melalui pergulatan pengetahuan oleh *Greenlandic* – masyarakat adat Greenland. Perlawanan ini merupakan upaya degradasi legitimasi pengaruh Denmark sebagai pihak kolonial di wilayah Greenland. Perlawanan ini dilakukan, misalnya, melalui produksi narasi anti-kolonial oleh *Greenlandic* dalam berbagai media kolonial. Surat kabar pertama (1861) pemerintahan Denmark, *Atuagagdliutit/Grønlandsposten*, menjadi medium strategis konstruksi kontra-narasi pendudukan dan praktik eksploitasi pemerintahan Denmark. Walaupun pada akhirnya Denmark berhasil melakukan aneksasi terhadap Greenland (Jensen, 2016), eksistensi agensi masyarakat adat Greenland dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan hal yang perlu diapresiasi sebagai ejawantah semangat dekolonisasi.



Perang Dingin yang Membuat Arktik Memanas

Perdamaian pasca-Perang Dunia II menjadi awal mula untuk perlombaan senjata oleh dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet Rusia—periode tata dunia yang kerap disebut sebagai Perang Dingin. Perang Dingin sangat berdampak pada kawasan Arktik. Secara geografis, jarak terdekat antara Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah melalui Arktik. Karenanya, Arktik menjadi garis terdepan dalam kontestasi Amerika Serikat-Uni Soviet.

Arktik memiliki dua aspek penting dalam kontestasi Amerika Serikat dan Soviet selama Perang Dingin. *Pertama*, militerisasi kawasan. Arktik menjadi arena perlombaan senjata (*arms race*) dan diiringi usaha-usaha untuk kontrol persenjataan (*arms control*). *Kedua*, arena untuk perlombaan dan percobaan teknologi. Proses militerisasi wilayah Arktik Utara berjalan dengan cepat, invasif, dan menyeluruh, baik di daratan, lautan, maupun udara (Kulchyski & Bernauer, 2014) sejak tahun 1950-an. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penyebaran persenjataan nuklir di basis-basis militer Alaska, Kanada, dan Greenland; pengaktifan radar Distant Early Warning (DEW Line) kolaborasi Amerika Serikat dan Kanada untuk peringatan awal bagi Amerika Serikat akan misil dari USSR; pesawat pengebom jarak jauh bermuatan nuklir dari kedua wilayah; patroli kapal selam dilengkapi misil dan torpedo nuklir yang konstan mengelilingi perairan Inuit; serta berbagai macam satelit pengintaian berbahan bakar nuklir (Bernauer, 2018; Hird, 2016; Zellen, 2009). Meskipun terdapat upaya untuk kontrol persenjataan, langkah-langkah tersebut seringkali tertinggal dibandingkan dengan laju militerisasi dan inovasi teknologi yang berlangsung di kawasan ini. Kombinasi antara eksplorasi ilmiah dan tekanan geopolitik menciptakan dinamika unik di Arktik, menjadikannya simbol persaingan global selama Perang Dingin.

Kontestasi kekuasaan atas Arktik memasuki babak baru pada 1950-an, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet turut membawa sengketa benua es ke meja perundingan PBB. Pada 1957, negara-negara Barat mengajukan rancangan mekanisme perlindungan apabila terjadi serangan mendadak ke Disarmament Commission (Armstrong, 1965; UN Yearbook, 1958).

Mekanisme ini meliputi sistem inspeksi yang mencakup seluruh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Kanada; atau apabila tidak memungkinkan, wilayah Arktik saja. Sebagai respons, Uni Soviet melayangkan tuduhan di Dewan Keamanan PBB pada 1958 bahwa Amerika Serikat telah membahayakan perdamaian dengan memberi izin pesawat terbang militer yang membawa bom-bom nuklir untuk terbang menuju wilayah Uni Soviet. Namun, Amerika Serikat mengelak tuduhan tersebut dengan mengajukan kembali permohonan untuk diadakannya sistem inspeksi, utamanya pada wilayah Arktik. Meskipun disetujui oleh sepuluh anggota Dewan Keamanan PBB, proposal tersebut diveto oleh Uni Soviet, dengan klaim bahwa sistem yang demikian hanya akan digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan informasi intelijen (Armstrong, 1965; UN Yearbook, 1958).

Pada tahun 1964, proposal dengan semangat multilateral kembali dicanangkan untuk mendiskusikan kembali kemungkinan menggunakan kawasan Arktik sebagai agenda kontrol persenjataan. Proposal tersebut didesain untuk mencapai 'zona bebas nuklir' di Arktik. Usulan ini dirancang sebagai inspeksi menyeluruh untuk: (a) memverifikasi ada atau tiadanya persenjataan nuklir di kawasan Alaska dan timur laut Siberia, serta sebagian dari Kamchatka, (b) kemungkinan menambahkan Greenland dan Denmark di sisi Uni Soviet, dan c) melibatkan seluruh negara dalam Zona Arktik termasuk Kanada, Norwegia, dan Swedia (Armstrong, 1965).

Memasuki 1970-an, Arktik terus menjadi kawasan penting dalam konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sekilas, tampak bahwa Arktik sebagai arena kontestasi didominasi oleh pergulatan Uni Soviet vs. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya—Norwegia, Islandia, Denmark, dan Kanada. Namun, dengan keanggotaan negara-negara tersebut dalam NATO sejak tahun 1950, seluruh kawasan Arktik praktis terafiliasi dengan kedua blok Perang Dingin. Peningkatan aktivitas militer dan ancaman mendorong NATO untuk membangun kehadiran pertahanan yang kuat di wilayah tersebut untuk mengamankan kepentingan Barat melalui pengawasan ketat di wilayah ini. Era Perang Dingin mengawali penerapan sistem peringatan dini, pangkalan militer, serta upaya pengawasan yang dirancang untuk mencegah Soviet dan



menjaga kepentingan NATO di Arktik, sekaligus mengamankan jalur pasokan transatlantik yang penting bagi pertahanan Barat (Donnelly, 2024).

Selain itu, risiko Kehancuran yang Dijamin Bersama (*Mutually Assured Destruction*) membentuk keseimbangan strategis antara ancaman dan kerentanan yang terbangun dari pencegahan tradisional melalui ancaman sanksi (Evans, 2021). Pergulatan keduanya di Perang Dingin melibatkan potensi ancaman udara melalui pesawat pengebom strategis dan rudal balistik antarbenua (*Intercontinental Ballistic Missiles* atau ICBM) yang melintasi kutub, serta ancaman maritim dari kapal selam rudal balistik dan kapal selam pemburu-pembunuh. Operasi di bawah es laut Arktik (Schmitz et. al., 2008 dalam Teeple, 2021), termasuk pula di antaranya adalah aliansi strategis Greenland-Islandia-Inggris (GIUK), terbukti kondusif bagi pengumpulan intelijen serta penentuan posisi aset-aset artileri dan persenjataan lainnya. Samudra Arktik juga berfungsi sebagai rute potensial bagi kapal selam dan pesawat pengebom Soviet.

Dinamika perlombaan kontrol senjata terus berlanjut. Kerja sama bilateral dalam pengendalian senjata nuklir muncul dari meningkatnya destabilisasi yang diciptakan oleh kompetisi ini. Negosiasi pengendalian senjata, seperti Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (SALT I), berujung pada perundingan tahun 1972 Perjanjian Rudal Anti-Balistik (ABM) untuk membatasi pertahanan rudal anti-balistik dan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) tahun 1987 untuk membatasi pengerahan kekuatan nuklir jarak menengah (Teeple, 2021). Perjanjian-perjanjian ini menjadi momentum awal, buah hasil dari proses advokasi anti senjata bertenaga nuklir.

Dalam salah satu studi yang mengetengahkan perlawanan masyarakat adat terhadap perkembangan senjata nuklir dan operasinya di kawasan Arktik, Bernauer (2018) menemukan bahwa banyak studi pendahulu yang mereduksi peran masyarakat adat Arktik, dalam contoh kasus ini masyarakat adat Inuit, semata-mata menjadi penggema pandangan dan subjek loyal pemerintah Kanada – yang adalah penggema kepentingan Amerika Serikat. Padahal, masyarakat adat-lah yang sesungguhnya membayar biaya mahal dari agenda

sekuritisasi tradisional ini – pencemaran dan degradasi lingkungan, ancaman keberlangsungan flora dan fauna endemik Arktik, serta tergerusnya kedaulatan masyarakat adat atas lahan dan tradisinya.

Manifestasi bagaimana masyarakat Arktik terdampak oleh militerisasi dan nuklirisasi perang dingin tampak pada pemindahan paksa masyarakat Inuit oleh pemerintah Kanada pada tahun 1950-an. Pemindahan ini tidak hanya mencerminkan dampak langsung dari Perang Dingin terhadap masyarakat adat, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas interseksional antara geopolitik, nuklirisasi, dan disrupsi lingkungan di kawasan Arktik. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Kanada berupaya memperkuat klaim kedaulatan dan mendukung agenda militer Amerika Serikat melalui proyek ambisius seperti Distant Early Warning (DEW) Line—sebuah jaringan stasiun peringatan dini yang membentang dari Alaska, Arktik Kanada, hingga Greenland dan Islandia (Zellen, 2009). Proyek ini tidak hanya menandai modernisasi militer di kawasan Arktik, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang signifikan, dengan limbah dari proyek tersebut menjadi warisan masalah yang kompleks hingga Arktik kontemporer (Stutzman et. al., 1987; Hird, 2016).

Untuk mendukung strategi geopolitik tersebut, pemerintah Kanada memanfaatkan masyarakat Inuit sebagai alat politik, memindahkan mereka secara paksa ke wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Ellesmere dan Cornwallis untuk memperkuat klaim kedaulatan di kawasan yang tidak berpenghuni (Madwar, 2018). Proses pemindahan ini dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dan sering kali dengan informasi yang menyesatkan, meninggalkan masyarakat Inuit dalam kondisi lingkungan yang jauh lebih ekstrem dan tidak mendukung keberlangsungan hidup mereka. Janji tentang sumber daya yang melimpah di wilayah baru ternyata meleset, sementara pembatasan berburu serta kerusakan ekosistem akibat proyek militer semakin memperburuk kondisi mereka (Hird, 2016; Relli, 2024). Proses ini mencerabut masyarakat Inuit dari sejarah panjang kedekatan mereka dengan lingkungan hidupnya, dalam pengetahuan dan



dalam tradisi, yang dikonsepsikan dalam Inuit Nunangat (Forsythe, 2018; Saami Council & German Arctic Office at the Alfred Wegener Institute, 2021).

Proyek seperti DEW Line juga menunjukkan bagaimana pendekatan “*develop now; remediate later*” menghasilkan biaya besar tidak hanya dari segi lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat adat. Limbah militer yang tersebar di wilayah Arktik menjadi simbol kegagalan kebijakan ini, mengorbankan hak masyarakat Inuit untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan mendukung tradisi mereka (Bernauer, 2018; Hird, 2016).

Dalam konteks Perang Dingin, upaya nuklirisasi dan modernisasi Arktik oleh Kanada dan Amerika Serikat secara langsung mengabaikan kedaulatan Inuit, memanfaatkan mereka untuk mendukung agenda militer yang didorong oleh polarisasi ideologis dan kompetisi global. Kasus ini menjadi pengingat akan dampak kolonialisme internal yang dihidupkan kembali melalui militerisasi, sekaligus menyoroti urgensi untuk mengintegrasikan perspektif masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan dan kedaulatan wilayah di Arktik. Di tengah ketegangan peningkatan kapasitas militer dan polarisasi ideologis, analisis Peneliti yang mendiskusikan Perang Dingin kerap kali luput membahas bagaimana kontestasi ini bergulir di panggung Arktik, terutama terkait dampak pada dinamika kehidupan masyarakat adat di Arktik. Meskipun terdapat konsensus mengenai perlunya kontrol persenjataan di kawasan Arktik, belum banyak studi yang mengetengahkan peran dan perlawanan dari masyarakat adat Arktik (Bernauer, 2018).

Memahami perlawanan masyarakat Inuit terhadap militerisasi Arktik membutuhkan pertimbangan akan kedekatan kehidupan masyarakat dengan industri nuklir. Dalam berbagai kesempatan, juru bicara berbagai koalisi advokasi masyarakat adat Inuit menyatakan kekhawatiran akan dampak ekologis dari praktik-praktik ini. Dalam kurun waktu dua hingga tiga dekade awal Perang Dingin, sudah terasa dampak jangka pendek dari kurangnya perhatian kepada manajemen keamanan dan pembuangan limbah

pengoperasian persenjataan berbasis nuklir. Salah satunya adalah ketika sebuah satelit pengintaian berbasis nuklir USSR jatuh di wilayah Arktik Kanada, dekat dengan wilayah penduduk komunitas Inuit di Danau Baker, pada 1978.

Meskipun ada upaya pembersihan, operasi tersebut tidak dapat membendung kontaminasi dari bahan bakar nuklir yang tumpah dari kecelakaan. Kontaminasi ini mencapai ekosistem karibu sehingga banyak pemburu karibu yang terpapar efek radioaktif nuklir. Parahnya, banyak aktivitas militer yang dilangsungkan Amerika Serikat pada 1950-an hingga 1960-an bersifat rahasia dan baru terbuka bagi publik bertahun-tahun setelahnya. Karenanya, hanya terdapat sedikit sekali dokumentasi perlawanan dari masyarakat adat yang tercatat di masa-masa ini (Bernauer, 2018; Holtsmark & Tamnes, 2014).

Insiden-insiden seperti di Danau Baker bukanlah kejadian yang terisolasi. Komunitas masyarakat adat menyadari bagaimana kontestasi politik ini membawa dampak negatif bagi mereka dan kedaulatan atas wilayah yang telah direnggut. Bersamaan dengan terkuaknya praktik-praktik militerisasi yang destruktif, terbentuk persepsi kolektif masyarakat adat akan keberadaan militer dan industri nuklir di Arktik Utara. Narasi yang terbangun disampaikan salah satunya oleh politisi Greenland Aqquluk Lyngé (1992):

The nightmare of the Cold War had a most powerful effect on us. We were whisked into the rivalry of the two great superpowers... Suddenly, we found our settlements and hunting grounds invaded and airfields established, not to mention the test detonations of atomic weapons which polluted the air we breathe. Toxic chemicals were on our land, from one DEW line base to the other, from Alaska to the Greenland ice cap.(Lyngé, 1992; dalam Bernauer, 2018).

Ambisi Amerika Serikat dan fasilitasi Kanada dalam proses militerisasi di Arktik dibayar mahal oleh warga Inuit. Keresahan berkembang menjadi perlawanan ketika dampak-dampak dari pengembangan persenjataan mulai dirasakan, terutama terkait dengan perkembangan nuklir. Beberapa jalur formal yang coba ditempuh komunitas-komunitas sipil masyarakat Inuit, antara lain melalui:



1. Inuit Circumpolar Conference kemudian Inuit Circumpolar Council (ICC) (1977) yang beranggotakan Kanada, Siberia, Alaska, dan Greenland menjadi forum bagi masyarakat Inuit untuk membangun posisi yang kompak dalam merespons isu internasional. Resolusi pertama ICC menyuarkan pelarangan aktivitas militer di seluruh wilayah Inuit dan pada 1983, ICC menetapkan resolusi yang mendeklarasikan wilayah Inuit sebagai daerah bebas nuklir.
2. Perdebatan di *Government of Northwest Territory* (GNWT) dan Parlemen Kanada mengenai senjata nuklir dan uji coba rudal jelajah bergulir sepanjang 1980-an, memuncak setelah bencana ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl pada 1986.
3. Penolakan terhadap tambang uranium di Baker Lake pertama kali disuarakan di awal 1970-an. Kekhawatiran meningkat pula pasca Chernobyl, dengan advokasi menekankan risiko penggunaan uranium untuk persenjataan nuklir.

Berkelindan dengan bagaimana perlawanan masyarakat adat Arktik menuntut untuk terlibat dalam perumusan keputusan di Arktik, merebut kembali kedaulatan mereka untuk menentukan bagaimana lahan adat mereka digunakan dan dilestarikan, dinamika menarik berkembang dalam tradisi dan perkembangan pengetahuan di Arktik. Persepsi yang dibangun negara-negara berkepentingan di Arktik dan tumbuhnya kesadaran kolektif akan dampak jangka panjang militerisasi Arktik mengantarkan pada upaya-upaya demiliterisasi dan pengalihan fokus ke isu keamanan non-tradisional, termasuk konservasi lingkungan. Pembukaan tambang-tambang minyak di Arktik, terutama tambang di Teluk Prudhoe, Alaska yang dimulai sejak 1960-an menjadi katalis dalam wacana pemaknaan Arktik. Penemuan ini memiliki setidaknya dua implikasi: pertama, adanya insentif ekonomi masif dari minyak dan/atau energi di Arktik memunculkan tuntutan untuk pembentukan tata kelola kooperatif di bidang ekstraksi dan kedua, hal ini mendatangkan korporasi dan pengembang swasta yang selanjutnya turut menjadi aktor penting dalam dinamika Arktik.

Penambahan pemaknaan Arktik sebagai kontestasi ekonomi membuat pemahaman 'lingkungan' dalam perancangan kebijakan Blok Barat dan Blok Timur penting untuk ditelusuri, mengingat keterkaitannya dengan kontestasi kepentingan konservasi dan ekstraksi. Perancangan kebijakan militer di Arktik kerap dijelaskan melalui lensa bipolaritas kekuasaan antara kubu Amerika Serikat dan Rusia. Alih-alih merancang kebijakan 'Arktik-sentris', wilayah Arktik justru menjadi ekspansi kekuasaan bagi kedua belah pihak.

Pola pikir yang sama tercermin dalam kebijakan tata lingkungan Arktik, yaitu dengan menarasikan kebijakan tata lingkungan sebagai 'netral' dan untuk kebaikan bersama, kedua blok melanggengkan dominasi masing-masing dan berlomba untuk mengeksploitasi. Artikulasi kepentingan keamanan dan ekonomi kedua kubu meredam wacana pembangunan masyarakat adat di Arktik, menciptakan rezim yang memomorduakan keamanan manusia dan abai akan ruang bebas penduduknya untuk menentukan nasib mereka sendiri, serta merenggut agensi masyarakat adat atas lahan dan pengetahuannya (Gricius, 2022).

**Arktik Pasca-Perang Dingin:
Dari Isu Keamanan Tradisional ke Keamanan
Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi**

Mewujudkan Arktik sebagai 'Zone of Peace'

Pasca-Perang Dingin, kawasan Arktik mengalami berbagai transformasi. Di antaranya, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan, seperti polusi logam berat, minyak, radioaktivitas, dan pengasaman. Kondisi tersebut menandakan pentingnya pendekatan kooperatif di Arktik dalam melakukan perlindungan alam, mengingat isu lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu pihak. Kesadaran akan tantangan baru ini menandai pergeseran prioritas aktor-aktor internasional terhadap kawasan Arktik, dari isu keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional, yang kemudian mendorong hadirnya kerja sama untuk menjaga ekosistem Arktik.

Young (2019) menyatakan bahwa pada awalnya, Arktik belum dianggap sebagai kawasan penting bagi banyak aktor negara, utamanya dalam lanskap politik. Alih-alih mendirikan biro khusus untuk memetakan berbagai potensi kerja sama dengan Arktik, negara *superpowers* menempatkan tata kelola kawasan Arktik di bawah biro regional. Contohnya adalah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menugaskan isu kutub (Arktik dan Antartika) ke Biro Kelautan, Urusan Lingkungan Hidup, dan Pengetahuan Internasional. Kasus serupa juga terjadi pada Kementerian Luar Negeri Rusia yang menugaskan Departemen Eropa Kedua untuk menangani isu-isu signifikan internasional di Arktik (Young, 2019).

Sebetulnya, sejak 1980-an, telah muncul perubahan di antara aktor-aktor internasional dalam memandang Arktik sebagai kawasan dengan agenda kebijakan tersendiri. Hal tersebut salah satunya tercermin dari pidato Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Pada 1 Oktober 1987, Gorbachev menyampaikan pidato yang menyerukan agar Arktik diperlakukan sebagai 'zone of peace' dan mengusulkan pembentukan inisiatif kooperasi Arktik untuk membahas pengendalian senjata, pelayaran, isu masyarakat adat, lingkungan hidup, perlindungan, serta ilmu pengetahuan (Young, 2019). Agenda 'zone of peace' pada dasarnya ingin dicapai melalui pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Eropa Utara, pembatasan aktivitas angkatan laut di kawasan



Arktik, serta pendirian kerja sama lintas batas (Åtland, 2008). Dalam pidatonya, Gorbachev (1987) menekankan bahwa kooperasi diperlukan karena Arktik tidak hanya terdiri dari Samudra Arktik, tetapi juga tempat bertemunya kawasan Euro-Asia, Amerika Utara, dan Asia Pasifik, di mana masing-masing negara yang tergabung dalam blok militer maupun non-blok militer memiliki kepentingan berbeda-beda.

Agenda 'zone of peace' di kawasan Arktik ini mengindikasikan adanya pergeseran isu, dari keamanan tradisional menuju keamanan lingkungan. Aktivitas konflik selama Perang Dingin menghasilkan limbah radioaktif di kawasan Arktik yang mengancam kesehatan masyarakat serta ekosistem di kawasan tersebut (Arctic Environmental Protection Strategy, 1991). Implikasinya, negara-negara Arktik menjadi semakin sadar akan tanggung jawab mereka untuk memitigasi ancaman degradasi lingkungan.

Sebagai respons dari seruan Mikhail Gorbachev mengenai 'zone of peace,' para petinggi dari delapan negara Arktik—Kanada, Denmark, Finlandia, Iceland, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, serta Uni Soviet—mengadakan pertemuan di Rovaniemi, Finlandia, untuk membahas langkah-langkah kerja sama terkait perlindungan ekosistem Arktik pada September 1989. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Pemerintah Finlandia yang memandang bahwa koordinasi perlindungan kawasan Arktik sudah seharusnya menjadi agenda krusial. Delapan negara Arktik setuju untuk mengupayakan pertemuan para menteri yang bertanggung jawab terhadap problematika lingkungan Arktik (Arctic Environmental Protection Strategy, 1991).

Dalam pertemuan ini, dibentuk dua satuan tugas dengan tujuan menyiapkan berbagai isu yang dibahas dalam pertemuan kementerian selanjutnya. Satuan tugas pertama berfokus pada keadaan lingkungan Arktik dan berbagai upaya yang perlu diambil. Sementara itu, satuan tugas kedua berfokus pada kajian bagaimana hukum internasional menjadi pedoman dalam aktivitas tata kelola pemerintahan di kawasan Arktik serta bagaimana struktur kerja sama baru akan dilaksanakan (Arctic Finland, n.d.).

Ancaman terhadap lingkungan Arktik, khususnya polusi lintas batas, menjadi fokus utama dalam kerja sama. Isu perubahan iklim belum terlalu menjadi perhatian signifikan pada saat itu. Setidaknya, terdapat dua belas isu yang dimasukkan dalam agenda satuan gugus lingkungan hidup, yakni lingkungan laut, perubahan iklim dan polusi, radioaktivitas, bahan kimia dan minyak, rantai makanan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya hayati, ekonomi lingkungan, kesehatan lingkungan, polusi suara, pusat populasi, serta masyarakat adat (Arctic Finland, n.d.).

Gagasan mengenai pembentukan kerja sama di Arktik dan 'zone of peace' mencapai momentum setelah berakhirnya Perang Dingin yang diindikasikan dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Sebagian besar kawasan Arktik mulai bebas dari konflik geopolitik (Rosen, 2022). Ketegangan antara Washington dengan Moskow mereda dan keseimbangan kekuatan dunia telah beralih pada sistem internasional unipolar yang menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor dominan dalam tata dunia global (Nowak, 2014).

Berakhirnya Perang Dingin memudahkan poros konflik di Arktik yang menjadikannya sebagai tempat persaingan senjata dan ancaman nuklir. Setelah Perang Dingin, isu militer tidak hilang dari wacana sepenuhnya, tetapi mulai terpinggirkan. Sementara itu, pembahasan mengenai lingkungan hidup semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu kerusakan lingkungan (Nowak, 2014). Pada tahun 1990-an inilah, terdapat momentum untuk membentuk kerja sama antara Amerika Serikat dan Rusia di Arktik guna menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Selain itu, kerangka kerja sama diplomatik regional juga didirikan (Gomes, 2022).

Pertemuan delapan negara Arktik tahun 1989 dilanjutkan dengan pertemuan persiapan di Yellowknife, Kanada pada bulan April 1990; Kiruna, Swedia pada bulan Januari 1991; serta Rovaniemi, Finlandia pada bulan Juni 1991 (Arctic Environmental Protection Strategy, 1991). Pada pertemuan terakhir di tahun 1991, negara-negara Arktik membentuk Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) dan Declaration on the Protection of the Arctic Environment sebagai komitmen politik, alih-alih legal, untuk menciptakan



kerja sama yang komprehensif. Tujuan AEPS adalah mengatasi masalah lingkungan, utamanya membangun respons multilateral terhadap polusi di Arktik pasca-Perang Dingin. AEPS turut mengikutsertakan masyarakat adat Arktik dalam kerangka kerja sama sebagai perwujudan pengakuan hak atas tanah air leluhur mereka. Negara-negara Arktik memberikan status pengamat permanen kepada tiga organisasi masyarakat adat, yaitu Inuit Circumpolar Council, Saami Council, serta Russian Association of Indigenous Peoples of the North (Arctic Council, n.d.).

Negara-negara Arktik juga membentuk empat kelompok kerja sebagai bagian dari AEPS (Bloom, 1999). Pertama, Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) bertujuan melakukan pemantauan dan memberikan penilaian terhadap tingkat polutan antropogenik di Arktik. Kedua, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) bertujuan mengkaji informasi atau penelitian terkait flora dan fauna di Arktik. Ketiga, Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) bertujuan untuk memfasilitasi kerangka kerja sama dalam merespons ancaman keadaan darurat lingkungan Arktik. Keempat, Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) yang bertanggung jawab dalam mengambil tindakan pencegahan atas pencemaran laut di Arktik (Bloom, 1999).

Pada tahun 1995, Kanada mengusulkan agar AEPS bertransformasi menjadi organisasi internasional baru, yaitu Dewan Arktik, yang tidak hanya mencakup program AEPS yang sudah ada, tetapi juga mengatasi isu pembangunan berkelanjutan (Bloom, 1999). Melalui penandatanganan Deklarasi Ottawa oleh delapan negara Arktik pada tanggal 19 September 1996, Dewan Arktik secara resmi dibentuk sebagai *intergovernmental forum* untuk memfasilitasi koordinasi di antara negara-negara Arktik dengan penduduk Arktik lainnya dalam isu-isu umum, utamanya pembangunan berkelanjutan dan proteksi lingkungan. Perubahan iklim dan keterlibatan masyarakat adat menjadi topik signifikan dalam Dewan Arktik. Representasi masyarakat adat sebagai pengamat permanen berkembang menjadi dua kali lipat dari AEPS, yakni mencakup Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich'in Council International, Inuit Circumpolar

Council, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, dan Saami Council. Mereka difasilitasi oleh *The Indigenous Peoples' Secretariat* (Sekretariat Masyarakat Adat) dan memiliki hak konsultasi penuh terkait negosiasi dan keputusan Dewan, serta dapat memberikan kontribusi berharga terhadap aktivitas Dewan di berbagai bidang (Arctic Council, n.d.).

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat adat dinilai penting dalam Dewan Arktik karena mereka telah hidup berdampingan dengan kondisi alam Arktik selama berabad-abad. Mereka mengembangkan kegiatan ekonomi perburuan dan penangkapan ikan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karenanya, inovasi serta pemahaman kontemporer masyarakat adat terkait dinamika kondisi alam di Arktik merupakan elemen krusial dalam membentuk kebijakan publik di kawasan tersebut. Mereka mempunyai hak untuk dilibatkan sebagai pemangku kepentingan, di mana masyarakat adat dapat memberikan perspektif baru yang tidak dimiliki oleh pemerintah negara bagian (Alexander & Bloom, 2023).

Selain itu, keberagaman representasi masyarakat adat tidak kalah penting. Meskipun sebagian besar adalah kawasan maritim, Arktik juga mencakup hutan terluas di planet bumi – hutan boreal. Tidak semua masyarakat adat tinggal di wilayah pesisir, contohnya adalah suku Gwich'in yang menempati daratan sehingga dapat memberikan pengetahuan tambahan terhadap kebijakan non-maritim mengenai penanganan kebakaran hutan atau kesehatan sungai (Alexander & Bloom, 2023).

Apabila ditelisik lebih lanjut, eksistensi Dewan Arktik merupakan aspek penting dalam mewujudkan 'zone of peace' di kawasan Arktik seiring dengan hadirnya forum kerja sama internasional. Forum ini memberikan wadah kolaborasi bagi masyarakat adat Arktik, berbagai aktor dari seluruh dunia, serta pemerintah di delapan kawasan Arktik untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kekhawatiran bersama. Dewan Arktik adalah manifestasi dari adanya kesadaran dan kepentingan masing-masing negara Arktik untuk melindungi ekosistem di kawasan tersebut. Sebagai inisiator, ide pembentukan Dewan Arktik sejalan dengan prioritas utama Kanada terhadap kawasan Arktik yang



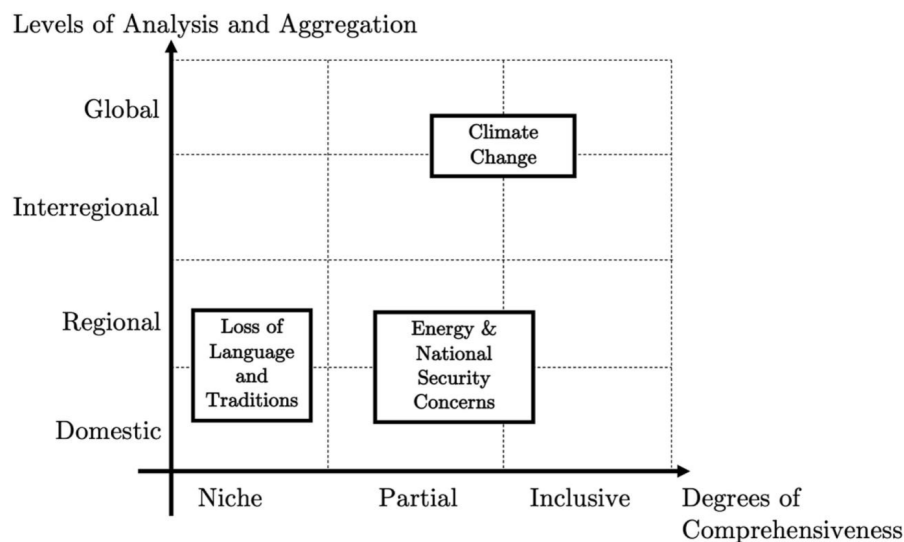
meliputi pembangunan sosial-ekonomi dan budaya, proteksi lingkungan dan perubahan iklim, serta memperkuat relasi dengan masyarakat adat (Arctic Council, n.d.). Pada awal berdirinya, Kanada menjadi negara yang memegang kepemimpinan Dewan di tahun 1996-1998, diikuti oleh Amerika Serikat, Finlandia, Islandia, Rusia, Norwegia, Denmark, dan Swedia. Kepemimpinan Dewan tersebut selalu berotasi setiap dua tahun (Bloom, 1999).

Namun seiring berjalannya waktu, Dewan Arktik menghadapi tantangan dalam menangani isu yang terus berkembang di kawasan Arktik. Tidak dapat dimungkiri bahwa kawasan tersebut mengalami perubahan yang begitu cepat. Selain isu lingkungan yang berdampak pada setiap bagian dunia, terdapat masalah klaim teritorial, infrastruktur maritim, eksploitasi sumber daya alam, dan situasi politik baru (Arctic Portal, n.d.). Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan intensi pihak eksternal ke kawasan Arktik seiring dengan mencairnya es di Arktik yang membuka peluang rute perdagangan untuk kepentingan ekonomi, salah satu contohnya adalah *Northern Sea Route*.

Arktik sebagai Ruang Kolektif

Munculnya kesadaran bersama untuk mewujudkan Arktik sebagai 'zone of peace' ditindaklanjuti oleh upaya politik untuk menjadikan Arktik sebagai ruang kolektif bagi negara-negara Arktik. Untuk membangun ruang kolektif tersebut, dua jalur yang ditempuh adalah melalui sekuritisasi keamanan lingkungan dan kesejahteraan. Bagian ini akan menyoroti proses sekuritisasi terhadap keamanan lingkungan dan kesejahteraan sebagai jalan untuk mewujudkan Arktik sebagai ruang kolektif.

Sekuritisasi merupakan konsep dalam studi keamanan internasional yang merujuk pada upaya membangun narasi suatu isu sebagai ancaman keamanan. Proses sekuritisasi dimulai ketika aktor politik menyatakan atau mengungkapkan (*speech act*) bahwa isu tertentu bersifat mengancam dan eksistensial sehingga memerlukan tindakan penanganan (*extraordinary measures*) (Buzan et al., 1998). Dalam konteks Arktik, tindakan ini diambil untuk melindungi kepentingan para aktor politik di kawasan.



Skema 1. Skema Konstelasi Keamanan Arktik (Fakhoury, 2023).

Untuk memetakan tren sekuritisasi di Arktik, Fakhoury (2023) memvisualisasikan temuannya dalam sebuah skema (tercantum dalam **Skema 1**). Skema ini dibentuk berdasarkan hasil analisis pidato perwakilan negara dan

masyarakat adat dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Arktik. Istilah-istilah yang terkait dengan keamanan, seperti 'ancaman,' 'keamanan,' 'kecemasan,' dan 'tidak terkendali,' sering muncul dalam dua isu besar, yaitu isu keamanan lingkungan dalam topik perubahan iklim, serta isu kesejahteraan dalam topik perekonomian nasional dan tradisi masyarakat adat.

Sekuritisasi Isu Lingkungan. Topik perubahan iklim mendominasi tren sekuritisasi di Arktik karena dampaknya yang meluas hingga ke tingkat antarkawasan dan global. Hal ini tidak hanya menimbulkan urgensi bagi negara-negara Arktik, tetapi juga negara-negara non-Arktik dan aktor non-negara untuk melakukan upaya perlindungan terhadap ekosistem global dan keberlangsungan peradaban manusia (Debanck, 2024). Karenanya sekuritisasi dilakukan untuk memastikan isu-isu lingkungan di Arktik mendapatkan perhatian yang lebih besar dan tindakan penanganan yang efektif (Fakhoury, 2023).

Selain melalui pidato Dewan Arktik, konstruksi sekuritisasi isu keamanan lingkungan juga dapat dilihat melalui beberapa pernyataan. Pada tahun 2003, mantan wakil ketua Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), John Houghton, memperingatkan bahwa perubahan iklim merupakan 'senjata pemusnah massal' yang mengakibatkan lebih banyak korban jiwa dibandingkan dengan aksi terorisme (Houghton, 2003). Sejak itu, Dewan Keamanan PBB mulai membahas perubahan iklim sebagai ancaman keamanan, tetapi tidak secara signifikan (Brown et al., 2007). Beberapa tahun kemudian, istilah 'senjata pemusnah massal' kembali diangkat oleh John Kerry, mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat, untuk mengingatkan negara-negara berkembang, yang berada di 'garis depan perubahan iklim,' agar segera mengurangi emisi gas rumah kaca mereka (Denyer, 2014).

Aktor lain yang secara konsisten memperhatikan perubahan iklim sebagai ancaman keamanan adalah NATO, mengingat hampir seluruh negara Arktik merupakan anggota NATO. Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, menyebutkan bahwa perubahan iklim dan akses baru ke sumber daya alam

di Arktik merupakan 'pengganda ancaman' yang memerlukan respons keamanan terkoordinasi antarnegara NATO (Şahin & Çetiner, 2024).

Selain melalui pernyataan, upaya sekuritisasi isu keamanan lingkungan juga tercermin melalui kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan “*China’s Arctic Policy*” yang dibentuk sebagai respons terhadap mencairnya es di Arktik (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2018). Peneliti dari *Chinese Academy of Meteorological Science*, Xiao Dong, merespons kebijakan ini dengan menyerukan aksi untuk “*mencegah ancaman terhadap kehidupan dan properti masyarakat Cina akibat cuaca ekstrem dan peristiwa iklim yang dipicu oleh pemanasan Arktik*” (Wang, 2020 dalam Wang & Xu, 2022).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sekuritisasi keamanan lingkungan tidak hanya menyoroti kepentingan negara-negara Arktik, tetapi juga mencakup kepentingan global karena saling terkaitnya implikasi perubahan iklim. Implikasi ini juga menarik perhatian dan keterlibatan dari lebih banyak aktor. Meskipun berangkat dari kesadaran bersama mengenai dampak perubahan iklim, para aktor politik juga mengidentifikasi peluang ekonomi dan strategis yang muncul. Oleh karena itu, aspek ini perlu turut diamankan, terutama bagi negara-negara Arktik yang memiliki kepentingan langsung.

Sekuritisasi Isu Kesejahteraan. Setelah perubahan iklim, topik perekonomian nasional dan tradisi masyarakat adat muncul sebagai tren sekuritisasi yang dominan di tingkat regional dan domestik. Hal ini dikarenakan adanya persaingan untuk mengembangkan industri vital dan memiliki akses terhadap sumber daya alam dan industri vital. Perekonomian negara-negara Arktik dapat terancam apabila mereka tidak mampu mengamankan kepentingannya dan mengalami kebangkrutan, perubahan kebijakan yang tidak menguntungkan, serta penerapan sanksi internasional. Perlindungan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya tensi isu-isu di Arktik.

Salah satu negara yang mengaktualisasikan perlindungan industri vital serta perekonomian nasional adalah Rusia. Mereka berupaya membangun isu



energi sebagai masalah keamanan untuk melindungi industri energinya. Konstruksi ini tercermin melalui dua kebijakan, yaitu Energy Strategy (ES) dan National Security Strategy (NSS) (Ferris, 2023). Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembatasan terhadap industri hidrokarbon akan dianggap sebagai ancaman keamanan karena energi mempengaruhi semua aspek keamanan dan kehidupan di Rusia.

Ancaman prominen lain terhadap perekonomian adalah kompetisi sumber daya alam yang berharga. Tidak hanya Rusia, peneliti Amerika Serikat juga menemukan bahwa potensi sumber daya di wilayah utara Lingkaran Arktik mencapai 90 miliar barel minyak, 1.669 triliun kaki kubik gas alam, dan 44 miliar barel cairan gas alam (U.S. Geological Survey, 2008). Hal ini memicu Amerika Serikat untuk turut melakukan sekuritisasi dalam rangka mengamankan kebutuhan dan ketergantungan ekstraksi bahan bakar fosil mereka (The White House, 2013).

Persaingan kepentingan yang intensif antara negara-negara besar di kawasan Arktik tidak hanya memicu ketegangan geopolitik, tetapi juga berdampak pada terpinggirkannya isu-isu penting lainnya. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah menurunnya perhatian terhadap upaya melindungi identitas kolektif masyarakat adat yang semakin terdesak dalam dinamika tersebut. Ancaman terhadap masyarakat adat sering kali muncul dari kebijakan asimilasi negara yang mengabaikan upaya mempertahankan identitas masyarakat adat (Hossain, 2016; Debanck, 2024). Sebagai respons, masyarakat adat melakukan perlawanan untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Berbeda dari bentuk sekuritisasi lainnya, situasi ini lebih dipandang sebagai *soft securitization*, yaitu upaya menangani ancaman melalui kerja sama, seperti yang tercermin dalam pembentukan Dewan Arktik, dengan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak dan identitas masyarakat adat (Greaves & Pomerants, 2017).

Dalam memahami sekuritisasi keamanan lingkungan dan kesejahteraan di Arktik, setidaknya terdapat dua konsep utama yang dapat digunakan, yakni konsep kompleksitas keamanan dan konstelasi keamanan.

Pertama, konsep kompleksitas Arktik (**Regional Security Complex/RSC**). Konsep ini didefinisikan sebagai “*sekumpulan unit dengan proses utama sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanannya tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain*” (Buzan & Wæver, 2003). Artinya, masalah keamanan di satu negara cenderung saling berkaitan satu sama lain dengan keamanan negara-negara lain di kawasan yang sama. ‘Unit’ yang terlibat biasanya adalah negara, tetapi bisa juga meliputi aktor non-negara (Lanteigne, 2016). Dalam kasus langka, unit-unit yang aspek keamanannya terlalu lemah atau lebih fokus pada urusan domestik daripada regional, tidak dapat bersatu sehingga menciptakan situasi ‘*null set*’, di mana tidak ada kondisi untuk membentuk kompleksitas keamanan (Buzan & Wæver, 2003).

Alih-alih dianggap sebagai RSC atau ‘*null set*,’ Arktik kerap diidentifikasi sebagai ‘*distinct RSC*’ karena penerapan RSC di kawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kawasan lain (Lanteigne, 2016; Padrtová, 2017). Arktik merupakan kawasan pinggir yang dahulu terisolasi sehingga tidak teridentifikasi dalam RSC. Namun, perubahan iklim yang cepat, sumber daya alam yang melimpah, dan aksesibilitas yang semakin meningkat menjadikan kawasan ini penting secara geopolitik. Tidak dapat dimungkiri bahwa kekuatan politik internal dan eksternal yang berkembang pada akhirnya memunculkan kompleksitas keamanan (Lanteigne, 2016). Kompleksitas tersebut terlihat dalam perbedaan sikap negara-negara Arktik yang menentukan dinamika keamanan di kawasan.

Perbedaan sikap antarnegara Arktik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni 1) Pejuang Arktik, yang sangat bergantung pada kawasan Arktik untuk identitas kebijakan luar negeri mereka, seperti Rusia dan Kanada; 2) Pragmatis yang Cemas, yang fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi serta mendukung keterlibatan Uni Eropa dan NATO untuk memperkuat posisi mereka di Arktik, seperti negara-negara Nordik; dan 3) Pemain Terlambat, yang baru mengeluarkan kebijakan terkait Arktik, seperti Amerika Serikat (Osica, 2010 dalam Padrtová, 2017).



Mengacu pada kategorisasi tersebut, saat ini Amerika Serikat sebenarnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai pemain baru. Perkembangan terkini telah mendorong negara-negara non-Arktik untuk turut terlibat aktif dalam dinamika Arktik. Mereka adalah negara-negara yang kini menjadi anggota pengamat permanen Dewan Arktik, seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Spanyol, Swiss, dan Inggris. Bahkan beberapa negara Asia, seperti Cina, India, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, juga telah terlibat dalam isu Arktik melalui keberhasilannya menjadi anggota pengamat permanen. Hadirnya pemain-pemain baru ini tidak hanya meningkatkan kompleksitas keamanan, tetapi juga mulai membentuk konstelasi keamanan di Arktik.

Kedua, konsep konstelasi keamanan (**Security Constellations/SC**). Berbeda dengan konsep kompleksitas keamanan, konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi aspek keamanan di berbagai tingkat analisis. Konsep ini didefinisikan sebagai pendekatan yang *“memisahkan keempat tingkatan—mulai dari negara, regional, antar-wilayah, hingga sistem global—untuk tujuan analisis dan menyatukannya kembali untuk mendapatkan gambaran yang utuh, dengan menekankan pada satu tingkatan atau tingkatan lainnya tergantung pada tujuan analisis (apakah negara tertentu, suatu wilayah, atau sistem internasional secara keseluruhan)”* (Buzan et al., 1998).

Konsep konstelasi keamanan relevan untuk menganalisis Arktik karena mempertimbangkan politik identitas, struktur politik, dan organisasi sistemik yang memengaruhi proses-proses sekuritisasi (Buzan & Wæver, 2009). Konsep ini membantu dalam pemetaan ancaman eksistensial serta aktor, audiens, dan tindakan dalam proses sekuritisasi di berbagai tingkat analisis. Sekuritisasi dianggap efektif jika mampu mengurangi jumlah masalah dan konflik (Buzan & Wæver, 2009).

Kompleksitas dan konstelasi keamanan yang terbentuk telah menjadi suatu esensi tersendiri bagi reposisi Arktik. Kawasan yang semula dimaknai sebagai ruang eksplorasi hingga kerja sama internasional (*cooperation front*), kini telah menjadi arena pergulatan (*competition area*) (Şahin & Çetiner, 2024). Reposisi ini menandakan kemunculan identitas baru bagi Arktik yang

disebut sebagai 'Arktik Baru.' Istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam periode ini, Arktik dipandang sebagai wilayah internasional yang akan memengaruhi kebijakan global sehingga peran Dewan Arktik menjadi semakin penting dalam menangani isu lintas batas di kawasan tersebut (Stronski & Ng, 2018; Serreze, 2018; Young, 2019).



Arktik sebagai Pusat Perhatian Baru Asia

Transformasi Arktik sebagai ‘zone of peace’ dan ruang kolektif menempatkan negara-negara Asia sebagai pengamat permanen yang terlibat aktif di kawasan, meskipun dengan pendekatan yang beragam. Proses sekuritisasi isu lingkungan dan kesejahteraan untuk mewujudkan Arktik sebagai ruang kolektif menggeser identitas Arktik sebagai ruang partisipasi bagi ragam negara. Ia bukan lagi menjadi entitas yang terabaikan, melainkan kawasan yang strategis.

Sekuritisasi narasi perubahan iklim dan usaha kolektif dalam memelihara keberlanjutan lingkungan menjadi basis dominan keterlibatan negara-negara Asia di Arktik (WWF, 2014). Akan tetapi, penting untuk menelusuri secara komprehensif intensi keterlibatan Asia di kawasan tersebut. Barangkali, narasi perubahan iklim dan keberlanjutan hanya sekadar dalih politik eksplorasi peluang ekonomi serta bisnis.

Bagian ini akan berfokus pada enam negara, yakni Cina, India, Singapura, Korea Selatan, serta Jepang, yang telah mendapatkan status pengamat permanen di Dewan Arktik sejak tahun 2013 (Tonami, 2014). Kondisi tersebut mengindikasikan signifikansi capaian negara-negara di Asia dalam forum diskusi Arktik. Sementara itu, Indonesia belum berhasil memperoleh status pengamat permanen di Arktik. Karenanya, peran Indonesia masih terbatas di kawasan.

Cina: Pendekatan Multidimensional dan Proyek Polar Silk Road

Cina merasa penting untuk terlibat di Arktik karena ia mengidentifikasi diri sebagai “*near-Arctic state*” dan *home of the “third pole”* (Heng & Freymann, 2023). Sebetulnya, imaji tersebut tidak memiliki relevansi dalam lensa geografis karena Cina tidak berbatasan langsung dengan Arktik. Identitas diri sebagai “*near-Arctic state*” justru bermakna politis untuk menunjukkan keseriusan Cina dalam menjalin relasi intim politik-ekonomi di Arktik (Descamps, 2019).

Sementara itu, imaji *the home of the “third pole”* dapat dipahami sebagai perangkat politik dalam menegaskan urgensi keterlibatan Cina di Arktik. Ini dikarenakan *third pole* berada di dataran Qinghai-Xizang yang memiliki karakteristik wilayah, seperti Kutub Utara dan Selatan (China Meteorological News Press, 2024). Secara kontekstual, akselerasi narasi dampak perubahan iklim yang turut berimplikasi di *third pole*—mencairnya gunung es secara eksponensial (Duncan, 2023)—menjadi basis legitimasi Cina untuk aktif terlibat dalam analisis dampak perubahan iklim di Arktik.

Dalam partisipasinya di Arktik, Cina menggunakan prinsip ‘*Total National Security*,’ yang berorientasi pada konsep keamanan secara menyeluruh, baik dalam lanskap tradisional maupun non-tradisional. Karenanya, keterlibatan Cina dalam Arktik dapat ditelusuri melalui empat lanskap, yakni politik, ekonomi, saintifik, dan militer. Bila ditelusuri, prinsip tersebut sebetulnya merepresentasikan komitmen Xi Jinping bahwa Cina berambisi menjadi ‘kekuatan besar di kutub pada tahun 2030’ (*polar great power*) (Doshi et al., 2021).

Dalam lanskap politik, keterlibatan Cina di Arktik menjadi instrumen ekspansi ‘kekuatan wacana’ (*discourse power*), yang dapat dimaknai sebagai kapabilitas negara mengontrol narasi dan agenda politik internasional. Implikasinya, Cina berpotensi menjadi pemimpin atas kontrol proses normatif dan legal politik internasional (Xia, 2018; Li et al., 2015 dalam Puranen & Kopra, 2023).

Guna mengonsolidasikan ‘kekuatan wacana’ tersebut, beberapa langkah strategis telah diambil oleh pemerintah Cina, seperti **1)** terlibat proaktif dalam aneka kesempatan forum multilateral di Arktik, **2)** akselerasi legitimasi melalui relasi non-formal bersama institusi pendidikan dan lembaga riset sebagai strategi ‘mengembangkan lingkaran pertemanan,’ serta **3)** intensifikasi relasi kemitraan bersama Rusia dalam industri ekstraktif dan pembangunan infrastruktur di Arktik (Puranen & Kopra, 2023). Keseluruhan strategi ini dapat dimaknai sebagai medium penetrasi kuasa dan pengaruh dalam tata kelola Arktik.

Dalam lanskap ekonomi, antusiasme Cina di Arktik merupakan reaksi atas peluang akselerasi konektivitas ekonomi. Perlu dipahami bersama bahwa akselerasi pembangunan ekonomi Cina berbanding lurus dengan intensifikasi konsumsi bahan energi. Artinya, kemajuan pesat ekonomi Cina tidak terlepas dari konsumsi minyak dan gas alam yang luar biasa. Cina perlu setidaknya mengimpor minyak sebesar 70% dan lebih dari 40% gas alam untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi. Di tengah dependensi tersebut, Arktik hadir sebagai entitas yang kaya sumber daya (Biagioni, 2023). Implikasinya, intensi Cina untuk terlibat aktif di Arktik menjadi pragmatis.

Cina menginisiasi sejumlah pembangunan ekonomi di Arktik dalam *master plan* proyek *Polar Silk Road*. Pada tahun 2013, Cina memulai investasi di Yamal LNG (*Liquefied Natural Gas*) di Rusia. Tidak hanya berorientasi pada aktivitas investasi, ambisi Cina turut terejawantahkan melalui konstruksi *Polar Silk Road* sebagai produk geo-ekonomi (Puranen & Kopra, 2023). Di bawah payung *Belt and Road Initiatives*, *Polar Silk Road* menjadi alat ekonomi-politik dalam memperkuat konektivitas jalur dagang dan proyek infrastruktur di kawasan Asia serta Eropa (Sharma, 2021). Bahkan, inisiasi *Polar Silk Road* membuka ruang strategis bagi Cina dalam memperkuat posisi politik di Arktik. Hal ini berbasis pada preposisi bahwa interdependensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya tawar.

Tidak hanya bertumpu pada motivasi politik dan ekonomi, Cina juga bermanuver dalam lanskap saintifik. Merujuk pada identitas diri Cina sebagai *the home of "third pole,"* kepentingan saintifik Cina memiliki relevansi terhadap identitas tersebut. Cina merupakan salah satu kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim. Karenanya, terdapat urgensi eksplorasi proyek penelitian ekologi, utamanya implikasi perubahan iklim terhadap Arktik. Dengan agenda tersebut, Cina memiliki potensi pemetaan aneka kebijakan protektif terhadap jalur ekspedisinya (Puranen & Kopra, 2023).

Tidak semata-mata sebagai alat akomodasi ancaman perubahan iklim, kepentingan saintifik Cina turut berkelindan dengan potensi intensifikasi relasi kerja sama di Arktik. Bila ditelusuri, Cina secara intensif

menggelontorkan sejumlah hibah penelitian di kawasan tersebut. Misalnya, melalui proyek pembangunan stasiun satelit di Swedia dan Greenland. Lebih lanjut, melalui *Institute of Remote Sensing and Digital Earth of the Chinese Academy of Sciences*, Cina menandatangani *Sino-Finnish Arctic Space Joint Research Cooperation Agreement* pada tahun 2018 bersama Finlandia (Wood, Stone, & Lee, 2021).

Sementara itu, beberapa akademisi (Li et al., 2015; Xiou, 2020; Martinson, 2019; Brady, 2019; Lajeunesse & Choi, 2021; Hirvonen, 2022 dalam Puranen & Kpra, 2023) meyakini bahwa intensi keterlibatan Cina di Arktik turut memiliki orientasi lanskap militerisme. Sebagaimana Arktik menjadi arena pergulatan strategis pada Perang Dunia II dan Perang Dingin, Cina turut melihat potensi tersebut. Bagi Cina, Arktik merupakan salah satu jalur alternatif apabila terjadi blokade di kawasan Selat Malaka pada saat pergulatan militer. Oleh karenanya, Cina meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan bagian timur sebagai kebijakan antisipatif. Lebih lanjut, Cina turut memproyeksikan Arktik sebagai domain baru dalam agenda operasi militer. Postulatnya, Arktik merupakan jalur penerbangan strategis yang melintasi kawasan Rusia, Eropa, Amerika Utara, dan Asia (Liu & He, 2015; Liu & Liu, 2018; Zhao, 2020; Xiao, 2020, dalam Puranen & Kpra, 2023).

India: Pendekatan Narasi Perubahan Iklim

Berbeda dengan Cina yang melakukan penetrasi dari segala arah, India menitikberatkan pendekatan saintifik sebagai instrumen akselerasi relasi di Arktik dengan fokus studi ekologi. Komparasi dengan pengamat permanen Asia lainnya menunjukkan India sebagai negara prominen dalam eksplorasi kajian keberlanjutan lingkungan di Arktik. Ini dikarenakan isu perubahan iklim akan berimplikasi pada disrupsi tata kelola ekonomi India.

Secara kontekstual, sektor agrikultur merupakan pilar penyokong ekonomi India. Karenanya, siklus angin muson memiliki peran kunci dalam mendukung keberhasilan sektor tersebut (Nanda, 2019). Siklus angin muson



memiliki kontribusi sebesar 70% curah hujan tinggi di India (Sing, 2024). Kerentanan atas perubahan intensitas curah hujan inilah yang menjadi basis manuver India di Arktik.

Bila ditelusuri, pemerintah India menerbitkan *India's Arctic Policy* sebagai acuan kerangka kerja sama strategis di Arktik. Secara eksplisit, eksistensi kerangka kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut atas kekhawatiran Dr. Jitendra Singh, Menteri Sains dan Teknologi, terhadap isu perubahan iklim yang berdampak destruktif pada makhluk hidup (Ministry of External Affairs, 2022). Terdapat enam pilar yang dikonstruksi pemerintah India untuk menjalin relasi baik bersama Arktik, yakni keilmuan dan penelitian, proteksi iklim dan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, konektivitas dan transportasi, tata kelola dan kerja sama internasional, serta pembangunan kapasitas nasional (Singh, 2024).

Pilar Prioritas	Objektif
<i>Keilmuan dan penelitian</i>	Akselerasi kapabilitas keilmuan serta proyek penelitian mengenai kawasan Arktik. Hal ini diwujudkan melalui inisiasi bilateral dan multilateral proyek penelitian kolaboratif.
<i>Proteksi iklim dan lingkungan</i>	Eksplorasi implikasi perubahan iklim di Arktik, termasuk pendekatan adaptif dalam merespons implikasi tersebut. Ini diejawantahkan melalui keterlibatan aktif India di <i>Dewan Arktik Group Working</i> , dengan berfokus pada proteksi lingkungan, flora, fauna, dan keberlanjutan maritim.
<i>Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia</i>	Intensifikasi peluang kerja sama di kawasan, baik antarnegara maupun masyarakat adat. Dalam aspek kerja sama dengan negara, eksplorasi mineral, energi, dan sumber daya lainnya menjadi prioritas kerja sama India, termasuk potensi implementasi energi terbarukan. Sementara itu, peluang kerja sama dengan masyarakat adat berorientasi pada diplomasi kultural, transmisi pengetahuan lokal, dan medium belajar



	praktik terbaik yang dipelihara oleh masyarakat adat Arktik.
<i>Konektivitas dan transportasi</i>	India dengan kapabilitas ilmu kelautannya, berambisi aktif dalam survei dan pemetaan jalur perdagangan Arktik serta program monitoring lingkungan terkait emisi. Semua ini bertujuan meningkatkan konektivitas North-South dan mengurangi biaya pengiriman (<i>shipping cost</i>).
<i>Tata kelola dan kerja sama internasional</i>	<i>Pertama</i> , intensifikasi keterlibatan India dalam inisiasi perjanjian yang berfokus pada perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. <i>Kedua</i> , menciptakan peluang kerja sama bersama multi-mitra Arktik. <i>Ketiga</i> , optimalisasi agenda promosi keamanan dan stabilitas Arktik yang mengacu pada traktat internasional.
<i>Pembangunan kapasitas nasional</i>	Eksplorasi dan akselerasi kapasitas India di kawasan Arktik melalui eskalasi kapasitas institusional penelitian.

Tabel 1. Pilar Kebijakan India di Kawasan Arktik.

Dikurasi dari India's Arctic Policy (2022)

Aktualisasi pilar-pilar tersebut diterjemahkan melalui sejumlah inisiatif .

1. *Mendirikan agensi penelitian yang berfokus pada kajian holistik Arktik.* Pada tahun 2000, pemerintah India membentuk *the National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR)*. Namun, agensi tersebut mengalami alih bentuk menjadi *National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)* di tahun 2018 dengan fokus kajian pada isu ekologi (Agrawala, 2022). Transformasi ini secara eksplisit mendemonstrasikan akselerasi kepentingan India di kawasan kutub, utamanya Arktik.
2. *Intensifikasi kerja sama bilateral dalam lanskap saintifik.* Secara spesifik, motivasi tersebut terejawantahkan melalui berbagai keberhasilan inisiasi kerja sama. India sukses membentuk *Norwegian*



programme for research cooperation (INDNOR) sebagai basis eksplorasi isu politik internasional, lingkungan dan iklim, energi bersih, serta pembangunan sosial pada tahun 2010 (RCN, n.d. dalam Agarwala, 2022). Lebih lanjut, India bersama Swedia turut sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai titik pijak kerja sama dalam penelitian terkait kutub (*polar science*) pada tahun 2019 (DST, n.d. dalam Agarwala, 2022). Bahkan, India melakukan proyek kolaborasi bersama Kanada melalui Polar Knowledge Canada (POLAR) sebagai inisiasi proyek penelitian (MoES, 2020 dalam Agarwala, 2022).

3. Dalam lanskap ekonomi, *India secara aktif melakukan kerja sama bersama Rusia pada lingkup eksplorasi minyak dan gas*. India dan Rusia sepakat melaksanakan proyek produksi dan eksplorasi lepas pantai minyak maupun gas secara kolektif. Sebagai konsekuensi positif, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Videsh Ltd. milik India memegang 26% saham milik Vankorneft dan 20% saham dari proyek Sakhalin-I (Nanda, 2019).

Betul bahwa eksistensi India di Arktik akan bermuara pada urgensi akomodasi kepentingan nasional. Terlebih, isu perubahan iklim menjadi basis penetrasi India di kawasan tersebut. Namun demikian, perlu dipahami bahwa aspek ekonomi turut menjadi kepentingan lain yang ingin diraih. Ini tampak jelas melalui inisiasi kerja sama eksplorasi minyak dan gas bersama Rusia, yang sebetulnya bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan lingkungan. Karenanya, analisis kritis terhadap intensi keterlibatan negara di Arktik menjadi penting.

Singapura: Pendekatan Komersialisasi dan Kompetensi Teknologi

Keterlibatan Singapura di Arktik terejawantahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tata kelola pemerintah. Secara politis, ini dapat dipahami sebagai ejawantah ambisi akselerasi peran Singapura dalam tata kelola global. Karenanya, Singapura seringkali hadir dalam berbagai

panggung konstelasi global melalui berbagai isu, salah satunya perubahan iklim. Kendati demikian, hasrat untuk mengamankan peluang ekonomi dan mitigasi tantangan komersial turut menjadi motivasi bergabungnya Singapura sebagai pengamat permanen di Dewan Arktik (Storey, 2014). Paling tidak, basis manuver Singapura di Arktik dapat diidentifikasi pada aspek lingkungan, perdagangan, bisnis, dan tata kelola pemerintahan.

Pertama, Singapura menyadari bahwa pencairan es di Arktik akibat pemanasan global memiliki konsekuensi negatif bagi kawasan Asia. Fenomena pemanasan global senyatanya telah mengubah lanskap Asia sebagai kawasan paling rentan terhadap bencana alam (Storey, 2016). Ini tentu menjadi ancaman bagi Singapura sebagai negara kecil yang berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Ancaman tersebut semakin aktual, mengingat potensi naiknya permukaan air laut (Bitzinger, 2020). Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC), proyeksi kenaikan rata-rata air laut Singapura berada pada level 1,15 meter di akhir abad ini (Ting, 2024). Karenanya, pemahaman komprehensif terhadap dinamika transformasi lingkungan Arktik menjadi penting bagi Singapura. Dengan demikian, proses konstruksi, formulasi, serta implementasi kebijakan proteksi tata kelola Singapura dapat berjalan secara mapan dan ideal.

Kedua, posisi Singapura sebagai pusat distribusi komoditas barang di dunia menjadi terancam atas terbukanya NWP sebagai jalur perdagangan alternatif. Berdasarkan kalkulasi untung-rugi sederhana, *Northern Sea Route* (jalur laut Utara) menjadi objek atraktif bagi banyak negara karena menawarkan jarak distribusi yang relatif pendek bagi Singapura. Sebagai ilustrasi, jarak tempuh antara Shanghai dan Hamburg akan lebih pendek 5.200 km² bila menggunakan jalur laut Utara, dibandingkan melalui jalur Selat Malaka (Bitzinger, 2020). Karenanya, kekhawatiran menjadi sikap yang lumrah, mengingat potensi kerugian ekonomi yang dapat hadir dari eksplorasi jalur perdagangan alternatif tersebut. Singapura memiliki pelabuhan terbesar kedua setelah Shanghai dengan rata-rata kunjungan per tiap tahun sebesar 120,000 perjalanan. Tidak dapat dimungkiri bahwa ini menjadi titik pijak



pertumbuhan ekonomi Singapura. Paling tidak, keuntungan yang diperoleh melalui pelabuhan tersebut mencapai lima kali lebih besar dari pendapatan nasional Singapura (Storey, 2016 dalam Bitzinger, 2020).

Ketiga, Singapura terlibat aktif dalam agenda eksplorasi dan pembangunan jalur perdagangan laut Utara sebagai respons mitigasi atas kekhawatiran dari eksistensi jalur alternatif tersebut. Melalui kompetensi teknologi, Singapura mengadakan proyek penelitian dan pengembangan kapal-kapal yang resisten terhadap iklim drastik. Tidak hanya itu, Singapura turut merancang sistem navigasi dan infrastruktur serta jalur perdagangan laut Utara yang ramah lingkungan. Keseluruhan partisipasi tersebut bermuara pada intensi untuk membuka peluang bisnis teknologi. Ini dapat dimaknai sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang bisa saja terjadi di masa mendatang atas operasionalisasi jalur perdagangan di laut Utara (Kulik et al., 2020).

Keempat, tidak terbatas pada lanskap lingkungan, perdagangan, dan bisnis, Singapura turut melakukan manuvernya dalam tata kelola pemerintahan global. Bagi Singapura, variabel tersebut penting untuk diakomodasi sebagai instrumen memperoleh legitimasi. Bahkan, sebagai arena untuk berkontribusi aktif dalam upaya formulasi dan implementasi norma-norma internasional. Tidak hanya itu, keterlibatan tersebut dapat dimaknai sebagai aktualisasi ambisi dan persepsi untuk terlibat aktif dan signifikan dalam urusan tata kelola pemerintahan global (Tonami, 2014 dalam Bitzinger 2020). Ini tercermin melalui sejumlah aktivitas. Bila ditelusuri lebih lanjut, Singapura memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang kemaritiman yang memadai. Sejak tahun 1990an, Singapura sudah terlibat aktif dalam keanggotaan International Maritime Organization. Dengan kekuatan tersebut, Singapura terlibat dalam organisasi 'Polar Code' sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan maritim dan keberlanjutan lingkungan di kawasan kutub (Bitzinger, 2020).

Lebih lanjut, Singapura turut menawarkan sejumlah keahlian kepada Dewan Arktik, utamanya dalam lanskap proteksi lingkungan. Ini dapat diidentifikasi melalui partisipasi aktif dalam kelompok kerja Conservation of Arctic Flora

and Fauna (CAFF), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME), and Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) (Storey, 2014).

Tampaknya, Singapura menunjukkan keberhasilannya dalam merespons ambivalensi di antara tantangan dan peluang keterlibatannya di Arktik. Kendati demikian, penting bagi Singapura untuk secara aktif memastikan bahwa kontribusinya dalam eksplorasi dan pembangunan jalur perdagangan NWP tidak menimbulkan kerugian masif dalam lanskap nasional. Artinya, kalkulasi utilitas keterlibatan Singapura di NWP dan masa depan keberlangsungan pelabuhan Singapura penting untuk dilakukan.

Jepang: Pendekatan Kapabilitas Lembaga Penelitian

Intensi keterlibatan Jepang di kawasan Arktik tercermin dari permohonan negara tersebut untuk menjadi pengamat permanen di Dewan Arktik pada tahun 2009. Hal ini salah satunya dikarenakan perubahan iklim di Arktik akan berimplikasi pada sirkulasi atmosfer dan samudra di Jepang sehingga negara tersebut harus turut andil dalam berbagai forum yang membahas kawasan Arktik (Ocean Policy Research Institute, 2017). Menurut Jepang, Arktik harus diakui sebagai bagian dari *the common heritage of mankind*, di mana pemanfaatan sumber daya alam di suatu wilayah perlu mempertimbangkan ketersediaan untuk generasi mendatang. Oleh karenanya, komunitas internasional mesti dilibatkan dalam menjaga ekosistem Arktik dan menggunakannya demi tujuan damai (Horinouchi, 2010 dalam Tonami, 2014). Sebagai bagian dari komunitas internasional dan negara yang aktif dalam proteksi lingkungan global, Jepang merasa bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan di Arktik (Tonami, 2014). Di samping itu, mencairnya es di kutub dapat membuka peluang ekstraksi sumber daya alam serta rute perdagangan yang menguntungkan bagi Jepang. Karena posisinya terletak paling dekat dengan Samudra Arktik di Asia, Jepang memiliki kesempatan besar di sektor ekonomi, khususnya dalam memanfaatkan jalur laut Arktik (Ocean Policy Research Institute, 2017).



Akhirnya pada bulan Mei 2013, sebagai respons terhadap permohonan Jepang, Dewan Arktik menempatkan Jepang sebagai salah satu pengamat permanen melalui diselenggarakannya Arctic Council Ministerial Meeting di Kiruna, Swedia (Tonami, 2014). Pada tahun tersebut, Jepang mengadopsi *Basic Plan on Ocean Policy* yang menggarisbawahi urgensi pemanfaatan lautan dan konservasi lingkungan laut melalui tindakan kolektif (Chuffart et al., 2020). Hal ini semakin mengindikasikan komitmen Jepang terkait urusan Arktik.

Kepentingan Pemerintah Jepang di kawasan Arktik tertuang dalam *Japan's Arctic Policy* yang diadopsi tahun 2015 sebagai bentuk penyempurnaan dari *Basic Plan for Ocean Policy*. Kepentingan tersebut mencakup *research and development*, kerja sama internasional, dan pemanfaatan berkelanjutan (Chuffart et al., 2020).

Pertama, dalam bidang *research and development*, Jepang bukanlah pendatang baru karena negara tersebut telah melakukan penelitian terkait perubahan lingkungan Arktik selama lebih dari setengah abad, yakni sejak tahun 1950-an (Tonami, 2014; Ocean Policy Research Institute, 2017). Kemudian pada tahun 1990, Jepang resmi menjadi anggota organisasi non-pemerintah yang berfokus pada kajian ilmiah Arktik, bernama International Arctic Science Committee (IASC). Capaian Jepang dalam tradisi penelitian Arktik juga ditunjukkan dari pembentukan Arctic Environment Research Center (AERC) sebagai bagian dari National Institute of Polar Research untuk mempromosikan studi tentang es laut, oseanografi, ekologi laut dan darat, serta ilmu atmosfer di Arktik (Miyaoaka, n.d.). Jepang secara proaktif melakukan kegiatan ilmiah dan observasi perubahan lingkungan di Arktik dengan menggunakan kapal penelitian serta satelit pengamat bumi (Ocean Policy Research Institute, 2017).

Selain itu, Jepang juga menjalankan proyek penelitian terbesar tentang Arktik bernama Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) dari tahun 2015 hingga 2020. ArCS bertujuan memberikan evaluasi kondisi Arktik saat ini dan risiko yang mungkin terjadi di masa depan kepada semua pemangku

kepentingan, baik dalam maupun luar negeri. Proyek tersebut didukung oleh National Institute of Polar Research; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi; Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology; serta Universitas Hokkaido. ArCS tidak hanya mengkaji perubahan iklim dan lingkungan, tetapi juga pengaruhnya terhadap masyarakat adat. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat adat yang menjunjung tinggi gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan secara tradisional. Namun, perubahan iklim serta polusi menempatkan mereka dalam kondisi sulit untuk bertahan hidup (Almazova-Ilyina et al., 2020).

Sebagai lanjutan dari ArCS, Jepang melangsungkan proyek ArCS II pada bulan Juni 2020 hingga Maret 2025. ArCS II bertujuan mendorong terwujudnya masyarakat berkelanjutan dan berfokus pada upaya tingkat lanjut untuk memahami status masa kini serta proses perubahan lingkungan di Arktik. Dalam proyek tersebut, Jepang berusaha membekali para pemangku kepentingan domestik dan internasional dengan pengetahuan ilmiah demi pembentukan regulasi internasional di Arktik (NIPR, 2021).

Kedua, dalam bidang kerja sama internasional, Jepang berinisiatif mempromosikan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara Arktik dan non-Arktik untuk merespons isu-isu global di Arktik. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat kolaborasi ilmiah serta teknis berdasarkan perjanjian kerja sama, menumbuhkan semangat penelitian Arktik berskala internasional dengan mendirikan stasiun penelitian di negara-negara Arktik, serta meningkatkan partisipasi Jepang dalam Arctic Circle, Arctic Frontiers, dan forum internasional Arktik lainnya (Cabinet Office, 2015).

Di tengah tingginya kekhawatiran atas implikasi perubahan lingkungan di Arktik terhadap kehidupan masyarakat, Jepang berkomitmen untuk menyampaikan temuan observasinya mengenai Arktik. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam memformulasikan regulasi internasional terkait pelestarian serta pengelolaan sumber daya perikanan demi menjaga ekosistem Arktik bersama-sama. Selain itu, Jepang berusaha meningkatkan kontribusinya sebagai pengamat di Dewan Arktik dengan



mengirimkan para ahli dan pejabat pemerintah ke berbagai kelompok kerja, gugus tugas, serta pertemuan dewan lainnya (Cabinet Office, 2015).

Ketiga, pemanfaatan berkelanjutan dalam kebijakan Jepang berkelindan dengan aktivitas ekonomi, seperti penggunaan jalur laut Arktik dan eksplorasi sumber daya laut atau mineral. Pada dasarnya, Arktik berperan penting dalam rute pelayaran Jepang, khususnya *Northern Sea Route* yang menghubungkan Jepang dengan Uni Eropa. *Northern Sea Route* dapat memberikan keuntungan berupa efisiensi pengiriman barang antara Jepang-Uni Eropa dan membantu meningkatkan volume perdagangan. Hal ini dikarenakan rute tersebut 40% lebih pendek dibandingkan Terusan Suez—jalur yang biasa digunakan Jepang (Almazova-Ilyina et al., 2020). Dalam memanfaatkan jalur laut Arktik, Jepang akan berupaya mengidentifikasi tantangan alam, sistematis, teknis, maupun ekonomi dengan membangun sistem prediksi cuaca dan distribusi es laut. Upaya tersebut bertujuan mendorong persiapan lingkungan oleh perusahaan pelayaran Jepang (Cabinet Office, 2015). Lebih lanjut, Jepang berambisi menjadi pusat maritim Asia melalui jalur laut Arktik. Pelabuhan Laut Tomakomai dianggap potensial sebagai pusat pelayaran dan perdagangan trans-Arktik (Almazova-Ilyina et al., 2020).

Kepentingan ekonomi Jepang di Arktik juga berkaitan dengan keamanan energi. Sebagai negara yang 90% bergantung pada impor energi, Jepang perlu mendiversifikasi sumber daya energinya, baik dari aspek jenis maupun pemasok. Saat ini, Jepang bergantung pada hidrokarbon Timur Tengah. Oleh karenanya, penting bagi Jepang untuk melakukan investasi terhadap proyek ekstraksi minyak dan gas Arktik untuk mengatasi ketergantungan Jepang pada satu sumber pemasok. Salah satu contohnya adalah kerja sama Jepang dengan negara Arktik, seperti Rusia, dalam mengembangkan sumber daya mineral Arktik. Kerja sama tersebut dinilai menjadi langkah strategis Jepang demi keamanan energi nasional (Almazova-Ilyina et al., 2020).

Korea Selatan: Kompetensi Teknologi dan Lembaga Penelitian

Ketertarikan Korea Selatan terhadap Arktik meningkat sejak awal tahun 2000-an, seiring dengan mencairnya es laut di wilayah kutub. Ketertarikan ini mencapai puncaknya ketika Korea Selatan ditetapkan sebagai pengamat permanen di Dewan Arktik pada Mei 2013 (Park, 2014). Korea Selatan kemudian mengadopsi kerangka kebijakan Arktik yang bernama *The Arctic Policy of the Republic of Korea*. Tiga pilar kepentingan Korea Selatan dalam *The Arctic Policy of the Republic of Korea* adalah memperkuat peluang ekonomi baru, meningkatkan kooperasi internasional, dan berinvestasi dalam penelitian ilmiah kutub (Heininen et al., 2020).

Sebagai upaya memperkuat peluang ekonomi, Korea Selatan berupaya melakukan diversifikasi sumber energi, pemanfaatan jalur laut, serta teknologi. **Pertama**, dalam aspek energi, Korea Selatan merupakan salah satu negara importir terbesar di dunia. Negara ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi 97% total konsumsi energi primernya pada tahun 2015. Sebanyak 84% minyak bumi dan bahan bakar cair yang dikonsumsi oleh Korea Selatan diimpor dari Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong Korea Selatan untuk mengidentifikasi potensi diversifikasi pasokan sumber daya energi minyak bumi di wilayah lain. Oleh karenanya, Korea Selatan secara aktif turut memperhatikan perkembangan sumber daya minyak dan gas di Arktik. Menurut perkiraan Institut Maritim Korea, sumber minyak di Arktik dapat menggantikan 10% impor minyak Korea Selatan dari Timur Tengah sehingga dapat meminimalisasi biaya transportasi sebanyak satu miliar dolar setiap tahunnya (The Arctic Institute, n.d.). Di samping minyak dan gas, Korea Selatan juga berminat pada eksplorasi sumber energi non-konvensional, berupa metana hidrat di Arktik (Bennett, 2014).

Kedua, potensi rute pelayaran Arktik memberikan daya tarik bagi Korea Selatan untuk meningkatkan jaringan bisnis. Perusahaan pelayaran Korea Selatan pertama kali melakukan pengiriman kargo melalui Arktik pada tahun 2013 dan hanya membutuhkan waktu 35 hari perjalanan dari Port Ust'-Luga ke terminal Gwangyang di selatan Seoul. Jalur laut Arktik menyediakan



alternatif pengiriman barang untuk menghindari lalu lintas padat, seperti Selat Malaka, Selat Hormuz, serta Terusan Suez. Jalur tersebut memungkinkan Korea Selatan dalam menghemat biaya bahan bakar sebesar 25% dan mengurangi waktu pengiriman hingga 10 hari antara pasar Asia-Eropa. Terlebih lagi, dengan mengembangkan *Northern Sea Route*, Pelabuhan Busan diperkirakan dapat menampung lebih dari 85 juta ton barang (The Arctic Institute, n.d.). Hal ini dapat memperkuat daya saing produk Korea Selatan di pasar Eropa dan memperluas target konsumen. Selain itu, Korea Selatan juga bercita-cita sebagai pusat distribusi minyak dan komoditas lain yang dikirimkan dari atau menuju Arktik, di mana Pelabuhan Busan dan Ulsan akan dipilih sebagai area pivot logistik (Moe & Stokke, 2019).

Ketiga, Korea Selatan memiliki atensi mengembangkan spesialisasi teknologi navigasi Arktik. Untuk memanfaatkan jalur laut Arktik, diperlukan teknologi canggih berupa kapal kontainer dan kapal tanker yang mampu memecah es. Korea Selatan berupaya memenuhi kebutuhan teknologi tersebut guna meningkatkan pengiriman serta eksplorasi sumber daya alam di Arktik. Beberapa perusahaan seperti Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, dan Daewoo Shipbuilding and Maritime Engineering (DSME) di Korea Selatan memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal sesuai kebutuhan navigasi di Laut Arktik. Sejak tahun 2014, DSME telah membangun 15 kapal pemecah es untuk mengangkut LNG (*Liquefied Natural Gas*) senilai \$4,8 miliar. Kemudian pada tahun 2018, DSME mengirimkan 6 kapal pengangkut untuk proyek LNG Yamal Rusia. Dalam hal ini, sekitar dua pertiga dari jumlah kapal tanker pengangkut LNG dunia merupakan buatan Korea Selatan (The Arctic Institute, n.d.).

Lebih lanjut, dalam pilar meningkatkan kooperasi internasional, Korea Selatan membangun sistem kolaborasi, baik di tingkat multinational maupun bilateral, dengan negara-negara anggota Dewan Arktik, khususnya Norwegia, Rusia, Denmark, dan Finlandia. Pemerintah Korea Selatan juga membangun infrastruktur kerja sama dengan negara pengamat permanen lain, seperti China dan Jepang (The Research Institute, n.d.; Jin et al., 2017).

Ambisi Korea Selatan tercermin dari pembentukan kelompok resmi yang beranggotakan 40 pakar untuk dilibatkan dalam satuan gugus tugas dan 10 kelompok kerja Dewan Arktik. Para pakar menerjemahkan laporan kelompok kerja tersebut ke dalam bahasa Korea guna mempromosikan Arktik di dalam negeri. Sebagai komitmennya dalam kerja sama di kawasan Arktik, Korea Selatan aktif menghadiri berbagai pertemuan pengamat permanen dan Arctic Council Ministerial Meeting untuk membahas isu-isu Arktik. Korea Selatan juga bergabung dengan organisasi internasional selain Dewan Arktik. Hal tersebut dibuktikan dengan menempati kepemimpinan dalam Pacific Arctic Group (PAG), memandu observasi bersama Samudra Arktik, serta berperan penting dalam penulisan dan penerbitan laporan untuk the *Third International Conference on Arctic Research Planning (ICARP-III)* (Jin et al., 2017).

Para ilmuwan Korea Selatan telah berkontribusi dalam membentuk jaringan antarpeneliti Arktik, bertukar hasil temuan tentang Arktik, serta berkolaborasi dengan Ny-Ålesund Research Station di Norwegia. Bahkan, beberapa ilmuwan tersebut turut menempati posisi sebagai pejabat eksekutif Inter-Agency Standing Committee (IASC), wakil ketua Forum of Arctic Research Operators (FARO), dan wakil ketua Ny-Ålesund Science Managers Council (NySMAC). Keaktifan Korea Selatan dalam kooperasi internasional tentang Arktik juga ditunjukkan dengan partisipasi negara tersebut dalam Arctic Frontiers dan Arctic Circle (Jin et al., 2017).

Dalam pilar penelitian ilmiah, Korea Selatan melakukan observasi di Arktik melalui Korea Polar Research Institute (KOPRI), yakni lembaga penelitian yang didanai oleh pemerintah untuk kawasan Arktik dan Antartika. Fokus utama KOPRI antara lain, menginvestigasi perubahan iklim dan ekosistem di kutub, proteksi lingkungan, serta mengoptimalkan nilai-nilai keberlanjutan di Arktik (Uarctic, n.d.). Melakukan penelitian di Arktik merupakan usaha Korea Selatan untuk berkontribusi dalam perlindungan ekosistem Arktik sebagai masyarakat internasional. Dalam konteks ini, Korea Selatan mencoba untuk memprediksi perubahan iklim melalui pengembangan teknologi asimilasi data di lautan dan es laut Arktik. Lebih lanjut, pencapaian Korea Selatan dalam lanskap penelitian dapat ditelusuri melalui



keterlibatannya dalam memproduksi peta Pan-Arktik, peta topografi, peta gambar, serta model elevasi digital Samudra Arktik dan pesisir Arktik. Selain itu, Korea Selatan juga mendirikan KoARC atau Korea Arctic Research Consortium untuk memfasilitasi komunitas akademik, perwakilan industri, organisasi profesional, serta berbagai lembaga penelitian membahas tiga bidang, yaitu sains, kebijakan, dan industri (Jin et al., 2017).

Indonesia: Minimnya Proyeksi Kepentingan di Arktik

Status pengamat permanen di Dewan Arktik yang dimiliki oleh Singapura, Jepang, India, Korea Selatan, dan Cina menghadirkan sejumlah keuntungan dalam lanskap ekonomi nasional dan kajian saintifik. Karenanya, penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam forum diskusi Arktik. Mengapa Indonesia penting membangun proyeksi kepentingan di Arktik?

Pertama, fenomena perubahan lingkungan di Arktik akan mempengaruhi semua negara, termasuk Indonesia (Ardhi, 2016). Mencairnya es di kutub akan menambah volume air di lautan. Sementara itu, Indonesia sangat rawan terhadap kenaikan muka air laut. Indonesia berada di peringkat kelima dunia dalam hal jumlah populasi yang tinggal di daerah pesisir dataran rendah, yakni sekitar 18% penduduk (World Bank Group & Asian Development Bank, 2021). Oleh karenanya, ketika es di Arktik mencair, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Lebih lanjut, berdasarkan INFORM Risk Index tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 59/191 sebagai negara rentan risiko iklim, dengan paparan tinggi terhadap banjir serta panas ekstrem. Tanpa adanya adaptasi efektif, jumlah populasi yang terkena banjir sungai ekstrem diproyeksikan mencapai 1,4 juta pada tahun 2035–2044 (World Bank Group & Asian Development Bank, 2021).

Kedua, peluang ekonomi di Arktik. Salah satunya tercermin dari bagaimana pencairan es di Arktik dapat membuka jalur pelayaran baru, seperti *Northern Sea Route*. Sebagai negara eksportir dan importir, terbukanya akses ke *Northern Sea Route* bagi Indonesia dapat mengurangi biaya transportasi serta



meningkatkan aktivitas perdagangan ekonomi dengan pihak asing. Hal ini dikarenakan *Northern Sea Route* merupakan jalan pintas untuk pengiriman barang antara Eropa dan kawasan Asia (Humpert, 2011).

Sebetulnya, Indonesia berpeluang membangun proyeksi kepentingan di Arktik ketika ia diundang oleh Presiden Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, dalam pertemuan tahunan Arctic Circle pada tahun 2014. Sementara negara-negara lain seperti India, Brasil, Turki, China, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura mengirimkan delegasi mereka, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru melewatkan undangan tersebut. Bahkan ketika memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu negara Arktik, yakni KTT ASEAN-Russia, Indonesia tidak memanfaatkan forum tersebut untuk membahas isu Arktik. Padahal, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan dukungan Rusia terkait status pengamat permanen di Dewan Arktik (Ardhi, 2016).

Baru kemudian di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai memiliki intensi untuk terlibat dalam dinamika pembahasan mengenai Arktik. Salah satunya adalah ketika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) menggelar pertemuan dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia untuk mendiskusikan langkah strategis dalam merespons perubahan iklim di Arktik (Kemenkomarves, 2016 dalam Nugroho et al., 2022). Pada tahun 2019, Kemenkomarves mengusulkan agar Indonesia mengajukan status sebagai pengamat permanen di Dewan Arktik guna membuka peluang baru terhadap penelitian perubahan iklim. Demi mencapai tujuan tersebut, Kemenkomarves mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas susunan naskah berisi urgensi Indonesia sebagai pengamat permanen. Berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretariat Negara, LSM yang membahas kemaritiman, serta akademisi hukum, kelautan, dan politik internasional, turut menghadiri proses FGD. Isu-isu yang menjadi prioritas Indonesia di Arktik berkelindan



dengan informasi dan pengetahuan, penelitian, perubahan iklim, keamanan energi, serta akses jalur pelayaran (Junida, 2019).

Dalam lanskap isu lingkungan, Indonesia melakukan refleksi terhadap terjadinya bencana alam akibat perubahan iklim. Salah satu contoh efek negatif perubahan iklim di Indonesia terjadi di Kota Semarang, yakni sekitar 1.211,2 hektar area telah terendam air. Semarang juga menghadapi abrasi laut yang menyebabkan hilangnya wilayah pesisir mencapai 1,7 km antara tahun 1991-2010 (Junida, 2019). Lebih lanjut, daerah garis pantai seluas 2.075,65 hektar di Kecamatan Bedono, Kabupaten Demak, juga terendam air laut (Kemenkomarves, 2019). Implikasi banjir rob di Kabupaten Demak selama kurang lebih 20 tahun, memaksa sekitar 200 kepala keluarga untuk pindah ke tempat lebih aman (Amindoni, 2020). Oleh karenanya, keterlibatan Indonesia di Arktik menjadi penting karena terdapat masalah serius yang perlu diselesaikan secara kolektif. Harapannya, keterlibatan ini bisa memberikan manfaat bagi Indonesia untuk memperoleh berbagai informasi penting dari tangan pertama terkait mitigasi lingkungan (Junida, 2019).

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memperoleh status pengamat permanen di Dewan Arktik. Salah satu problematika di balik ketidakberhasilan Indonesia setidaknya disebabkan oleh kurangnya riset dan pemahaman publik mengenai isu-isu Arktik. Hal ini dapat mencederai legitimasi Indonesia dalam penyusunan strategi Arktik dan meraih status pengamat permanen. Meskipun terdapat keinginan untuk memanfaatkan *Northern Sea Route* di Arktik, Indonesia tampaknya belum menaruh perhatian besar pada urgensi kebutuhan tersebut. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, strategi kemaritiman Indonesia masih berkuat pada wawasan geopolitik Poros Maritim Dunia dan Tol Laut. Selain itu, Indonesia juga masih bergantung pada jalur perdagangan di Selat Malaka untuk menunjang keuntungan sektor ekonomi (Nugroho et al., 2022). Ini menunjukkan hadirnya urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat basis penelitian dan kebijakan luar negeri tentang isu Arktik demi meningkatkan kredibilitas serta keseriusan Indonesia dalam Dewan Arktik.

Terlepas dari ketidakberhasilan tersebut, Indonesia berusaha menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara di Arktik, salah satunya adalah Denmark. Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (n.d.), kemitraan strategis antara Indonesia dan Denmark mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia dan dialog antaragama, energi hijau, ekonomi sirkular, pangan dan pertanian, kesehatan, maritim, pertahanan, pendidikan, serta budaya. Segala upaya untuk mewujudkan kemitraan strategis ini tertuang dalam Rencana Aksi Baru tahun 2021-2024 yang diluncurkan pada tanggal 22 November 2021 oleh mantan Menteri Luar Negeri Denmark, H.E. Jeppe Kofod, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, H.E. Retno Marsudi. Rencana Aksi Baru ini merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi tahun 2017-2020. Contoh capaian kerja sama Indonesia-Denmark adalah difusi praktik ekonomi sirkular dan manajemen sampah dalam kebijakan Indonesia melalui berbagai kegiatan atau seminar yang diadakan oleh Strategic Sector Cooperation (Singarimbun, 2022).

Prioritas kerja sama Indonesia-Denmark pada dasarnya berkelindan dengan upaya mitigasi perubahan iklim serta proteksi terhadap ekosistem. Hal ini dilakukan melalui promosi penerapan ekonomi sirkular dan pertumbuhan hijau yang berkelanjutan. Indonesia bersama Denmark telah menjadi mitra dekat dalam mewujudkan agenda lingkungan global dan nasional, di mana kedua negara tersebut meluncurkan target nasional ambisius dengan tujuan transisi ke ekonomi hijau. Kemitraan Indonesia-Denmark dalam bidang lingkungan berkelanjutan serta ekonomi sirkular tidak hanya berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi juga berkontribusi terhadap usaha mengurangi jejak karbon nasional maupun global. Denmark, sebagai salah satu negara pionir yang mengembangkan strategi ekonomi sirkular, akan turut terlibat dalam *knowledge sharing* untuk mencapai target ekonomi hijau (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Dalam konteks ini, kerja sama antara Indonesia-Denmark dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk melahirkan peluang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Arktik. Kerja sama tersebut dapat memberikan



kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat dalam diskusi perubahan iklim dan agenda pembangunan berkelanjutan.



China	India	Singapura	Jepang	Korea Selatan	Indonesia
Konstruksi imaji “ <i>near-Arctic state</i> ” dan “ <i>home of the third pole</i> ”	<i>India’s Arctic Policy</i>	Optimalisasi isu keberlanjutan lingkungan melalui: <i>Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)</i> , <i>Protection of the Arctic Marine Environment (PAME)</i> , and <i>Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR)</i>	Intensifikasi kajian penelitian Jepang mengenai isu Arktik, salah satu contohnya melalui ArCS	Akselerasi spesialisasi teknologi navigasi Arktik	Kajian ilmiah/penelitian dalam level <i>niche</i>
Prinsip <i>Total National Security</i>	Intensifikasi studi ekologi melalui <i>National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)</i>	Komersialisasi dan perdagangan	Peningkatan partisipasi Jepang dalam berbagai forum Arktik, baik bilateral maupun multilateral	Partisipasi aktif Korea Selatan dalam berbagai forum diskusi Arktik	-
Kekuatan Wacana	Kerja sama bilateral dalam lanskap perubahan iklim dan eksplorasi energi	Kapasitas teknologi	-	Penelitian ilmiah, contohnya melalui <i>Korea Polar Research Institute (KOPRI)</i> dan <i>Korea Arctic Research Consortium (KoARC)</i>	-
<i>Polar Silk Road</i> ; hibah penelitian; infrastruktur militer	<i>North-South Connectivity</i> ; keterlibatan masyarakat adat	-	-	-	-

Tabel 2. Strategi Pendekatan negara-negara Asia di Arktik.

**Menuju Tata Dunia Pasca-Unipolar:
Dari Ruang Kolektif ke Polarisasi Politik dan
Potensi Konfrontasi Militer**

Arktik dan Tata Dunia Pasca-Unipolar: Skenario Masa Depan Arktik

Era pasca-Perang Dingin yang awalnya diharapkan membawa stabilitas dan tatanan internasional, kini menghadirkan tantangan baru dalam corak pergulatan yang melibatkan negara *superpowers*. Corak kekuatan tersebut tidak lagi terbatas pada Amerika Serikat, melainkan berbagai kekuatan bermunculan dalam lanskap global politik yang saling tumpang tindih. Nuansa konstelasi kuasa dan kepentingan semakin majemuk, melemahkan hegemoni aktor adidaya. Imbasnya, pergulatan pengaruh antar-negara menjadi marak sebagai basis ekspansi kuasa. Dinamika ini tampak dalam kawasan Arktik. Kebangkitan Cina dalam lanskap global, ditambah dengan konfrontasi militer Rusia terhadap Ukraina, telah meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat dan NATO terhadap ekspansi pengaruh di kawasan Arktik.

Transformasi tata kelola Arktik pasca perang dingin yang diwujudkan dengan 'zone of peace' dan ruang kolektif telah mendorong negara-negara untuk membangun proyeksi kepentingan di kawasan tersebut. Melampaui semangat multilateralisme, pemaknaan Arktik sebagai ruang kolektif kini memudar akibat carut-marut kontestasi. Pergeseran konstelasi ini tentu berimplikasi pada masa depan Arktik. Bagian ini memeriksa tiga implikasi yang dihadapi Arktik dari pergeseran tata dunia yang baru: 1) *scramble for Arctic*, 2) berakhirnya Arktik sebagai 'zone of peace' dan 3) marginalisasi masyarakat adat.

Scramble for Arctic

Intensifikasi keterlibatan berbagai negara di Arktik membuktikan bahwa reposisi bukan sekadar wacana semata. Upaya sekuritisasi oleh berbagai negara hingga keterlibatan Asia yang secara geografis jauh dengan Arktik mendemonstrasikan hadirnya pergeseran wacana Arktik dalam lanskap konstelasi tata kelola global. Lebih lanjut, fenomena ini dapat diterjemahkan sebagai babak baru arena pergulatan bagi aktor negara maupun non-negara.

Keterlibatan negara-negara di Arktik secara sadar dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan nasional. Atas nama perubahan iklim sebagai ancaman



kolektif, berbagai aktor berlomba-lomba melakukan ekspansi kuasa. Kekhawatiran era dirupsi atas perubahan iklim menjadi satu persoalan yang dibingkai dalam berbagai inisiatif kerja sama di Arktik. Namun, semangat kapitalisme atas mencairnya es di Arktik menjadi pesona yang memikat perhatian aktor. Kekhawatiran akan terbukanya NWP sebagai jalur perdagangan alternatif dikhawatirkan dapat mendisrupsi mata pencaharian beberapa negara, termasuk Singapura. Karenanya, keterlibatan Singapura di Arktik dapat dipahami sebagai langkah pragmatis untuk meminimalisasi kerugian di masa mendatang.

Di tengah dinamika tersebut, penting untuk memastikan keberlanjutan Arktik sebagai sarana mitigasi dan rehabilitasi eksploitasi besar-besaran. Karenanya, membersamai dinamika Arktik di era kontemporer menjadi sebuah urgensi. Paling tidak, sub-tema ini akan mengajak pembaca untuk bersama-sama memaknai dinamika sekuritisasi Arktik sebagai kawasan lama, yang baru beberapa tahun terakhir menjadi wajah baru dinamika tata kelola global.

Dalam lanskap historis, eksplorasi Arktik memang sudah dilakukan sejak lama. Serreze (2019) dalam bukunya yang bertajuk *Brave New Arctic: The Untold Story of the Melting North* menjelaskan bahwa eksplorasi Arktik sangat tampak pada abad 18, 19, dan awal 20. Menariknya, eksplorasi tersebut memiliki motivasi yang selaras. Upaya akselerasi kapital, pemetaan NWP sebagai jalur laut alternatif, memperoleh prestise dan kejayaan, ekspansi kawasan baru, serta penelitian menjadi beberapa motif fundamental keterlibatan aktor negara dan non-negara di Arktik (Serreze, 2019). Sebagai amplifikasi, laporan dari United States Geological Survey pada tahun 2008 menyatakan bahwa Arktik merupakan kawasan potensial sumber daya. Ini dikarenakan sumber energi yang belum dieksplorasi terletak di kawasan tersebut (Gricius, 2021). Sebanyak 1,699 triliun kubik gas alam, 90 miliar barel minyak bumi, dan 44 miliar barel gas alam cair diidentifikasi berada di kawasan Arktik (Gauthier, 2021, dalam Shiblee & Rashid, 2021).

Eksplorasi dan eksploitasi Arktik tentu tidak menjadi masalah di masa lalu. Berlatarkan semangat kolonialisme, akses advokasi dan perlawanan

berhasil ditutup rapat. Kendati demikian, agenda tersebut menjadi permasalahan serius di era kontemporer, mengingat ruang mobilisasi aspirasi terbuka lebar. Saat ini, Arktik merupakan kawasan rentan terhadap perubahan iklim akibat residu eksplorasi, eksploitasi, dan industrialisasi besar-besaran di masa lalu. Bila abai, kerusakan ekologi di Arktik memiliki dampak simultan secara global, utamanya dalam isu kenaikan level air laut dan pemanasan global (Serreze, 2019).

Oleh karenanya, upaya kolaboratif antarnegara menjadi krusial dalam meminimalisasi dampak negatif dari perubahan iklim. Paradigma tersebut sebetulnya telah tumbuh dan berkembang di beberapa negara. Namun, intensi di balik inisiasi kolaboratif tersebut didasarkan pada semangat pragmatik klaim wilayah Arktik. Misalnya, konstruksi narasi Amerika Serikat terhadap intensifikasi kerja sama Cina dan Rusia di Arktik sebagai ancaman stabilitas kawasan (Al Jazeera, 2024), menunjukkan upaya sekuritisasi kepentingan nasional Amerika Serikat, alih-alih kepentingan kolektif Arktik.

Lebih lanjut, bergabungnya Finlandia di NATO pada tahun 2023 turut menandakan eskalasi sekuritisasi di Arktik. Integrasi Finlandia di dalam NATO tidak semata-mata dikarenakan agresivitas Rusia terhadap Ukraina, tetapi juga pengaruh media Barat dengan wacana *Russophobia*—ketakutan, prasangka buruk, dan kebencian terhadap Rusia—sehingga mengubah posisi netral Finlandia. Secara sadar, eksistensi Finlandia di NATO berpotensi menghadirkan ketegangan militer bersama Rusia, mengingat kedua negara tersebut memiliki wilayah perbatasan seluas 1,340 km² (Sharma, 2023). Pergulatan senjata dapat terjadi bila impulsivitas militer hadir di kawasan perbatasan tersebut.

Tidak hanya itu, agresivitas Rusia terhadap Ukraina turut berimplikasi pada dinamika Dewan Arktik. Konsekuensinya, tujuh negara Arktik – yang saat ini sudah bergabung di dalam NATO – mengnonaktifkan aneka inisiasi kerja sama di Arktik. Terdapat setidaknya 130 proyek yang dihentikan sebagai imbas agresivitas Rusia di kawasan (Fouche & Dickie, 2024). Oleh karena itu, signifikansi Dewan Arktik sebagai kerja sama inter-pemerintahan



menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Kontinuitas permasalahan ini akan berakhir pada pergulatan geopolitik, alih-alih upaya kolektif mengakomodasi aneka permasalahan kontekstual yang sedang menjadi ancaman di Arktik.

Pemaknaan Arktik sebagai arena pergulatan geopolitik tentu akan membahayakan dinamika Arktik di masa depan. Upaya klaim wilayah dan kolaborasi atas nama pergulatan dan ekspansi kuasa oleh berbagai negara akan memicu intensifikasi fenomena *scramble for the Arctic*. Terminologi ini sebetulnya sudah tumbuh dan berkembang sejak abad 19. Ini dapat diidentifikasi melalui aksi represif pemerintah Kanada pada tahun 1930 hingga 1960-an kepada masyarakat adat Arktik (Craciun, 2009).

Dalam rangka memperkuat klaim teritorial di kawasan utara Arktik, Kanada melakukan relokasi paksa terhadap kelompok Inuit (Craciun, 2009). Tidak hanya itu, Rusia pun pernah menancapkan bendera di dasar laut Kutub Utara sebagai basis klaim kawasan yang menyimpan cadangan minyak dan gas alam tersebut pada Agustus 2007 (Craciun, 2009; Parfitt, 2007). Karenanya, terminologi *scramble for the Arctic* dapat dimaknai sebagai bentuk kontestasi atas area tertentu sehingga eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di kawasan memperoleh legitimasi.

Intensifikasi fenomena *scramble for the Arctic* dapat ditelusuri sejak tahun 2011, di mana Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, dan Norwegia berlomba-lomba memperebutkan ‘sepotong’ kawasan belantara di Arktik. Kontestasi tersebut tumbuh dan berkembang pascapeneliti Amerika Serikat memproyeksikan bahwa pemanasan global akan berimplikasi pada mencairnya es di kawasan Arktik sehingga melahirkan potensi eksplorasi serta navigasi kawasan tersebut di tahun 2030 (Rosamond & Rosamond, 2015). Imbasnya, aneka bentuk sekuritisasi dilakukan oleh berbagai negara, salah satunya adalah Denmark yang menancapkan bendera nasionalnya di kawasan tak berpenghuni seluas 1.3 km², yakni Pulau Hans yang sebetulnya turut menjadi kawasan yang diklaim oleh Kanada (Rosamond & Rosamond, 2015).

The United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *global commons* sebagai “domain sumber daya atau area yang berada di luar

jangkauan politik suatu negara bangsa.” Seperti yang disebutkan sebelumnya, *commons* ini dipahami sebagai “laut, udara, angkasa, dan dunia maya,” (Murphy, 2010). Tragedi Kepemilikan Bersama sejatinya berakar dari sebuah problematika moral, yakni perilaku aktor rasional dengan kepentingan pribadi membahayakan keberlangsungan sumber daya milik bersama (Mazurier et. al, 2020). Meskipun United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mencakup ketentuan untuk kerjasama, konservasi, dan pengelolaan, sumber daya alam bersama di Samudra Arktik tetap berisiko mengalami "tragedi kepemilikan bersama," (Bicknell, 2019). Contohnya, Jepang mungkin melakukan penangkapan ikan berlebih pada perikanan yang diatur namun terancam, menghancurkan populasi ikan di Arktik. Rusia mungkin secara tidak sengaja melepaskan unsur beracun dari ekstraksi mineral dasar laut, yang dapat memicu krisis politik dan menghentikan aktivitas pengembangan sumber daya di masa depan. Selain itu, sebuah kapal tanker minyak Amerika Serikat yang melintasi jalur pelayaran baru di Arktik berpotensi menjadi bencana lingkungan seperti Exxon Valdez di abad ke-21 (Bicknell, 2019).

Fenomena ini menggambarkan penggunaan yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam di wilayah perairan internasional Samudra Arktik, seperti emas, tembaga, minyak, gas alam, ikan kod, dan ikan haring. Meskipun pengembangan sumber daya tersebut memberikan keuntungan bagi negara yang melakukannya, biaya kerusakan lingkungan yang diakibatkannya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat global (Bicknell, 2019). Fenomena tragedi kepemilikan bersama di Arktik terjadi dalam dua tahap. **Pertama**, eksploitasi sumber daya bersama, dikombinasikan dengan kenaikan suhu dan pemanasan global, krisis iklim dan pencairan es di Kutub Utara menjadi tidak terhindarkan. **Kedua**, pencairan es tersebut menciptakan rute pelayaran baru yang kemudian tidak hanya menjadi sumber daya bersama, tetapi juga menghadirkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat aktivitas komersial yang meningkat di kawasan tersebut. Konstelasi keamanan yang terjadi di Arktik ini dapat pula dipahami melalui kerangka kerja Meta-Tragedi



Kepemilikan Bersama (*meta-tragedy of the commons*), di mana terdapat tragedi lain dalam suatu tragedi (Mazurier et. al, 2020).

Meskipun terdapat kesepakatan di antara aktor-aktor Arktik mengenai ancaman krisis iklim dan dampak fatalnya dalam skala global, skenario ini kerap disiasati, ditindaklanjuti selayaknya sebuah kesempatan bisnis strategis dalam bidang pertambangan, energi, serta rantai pasok global. Dalam kerangka ini, terbangun dua narasi yang kontradiktif; narasi yang mentransformasi identitas Arktik dari hamparan es di Utara yang beriklim ekstrem dan sulit dijangkau menjadi lingkungan yang menguntungkan (dapat dieksploitasi) secara ekonomi dan sosial, serta narasi pentingnya kolaborasi internasional dalam preservasi keberlanjutan lingkungan Arktik.

Arktik bertransformasi dari hamparan es di Utara Bumi, beriklim ekstrem, serta sulit dijangkau menjadi sebuah kawasan yang menguntungkan dan ramah bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan ekonomi maupun sosial di Arktik. Bersamaan dengan hal tersebut, berkembang pula narasi pentingnya kolaborasi internasional dalam preservasi keberlanjutan lingkungan Arktik.

Peluang-peluang bisnis yang muncul turut mendorong upaya eksploitasi dan transformasi Arktik, memicu dinamika nasional dan transnasional dalam sekuritisasi kawasan ini. Tata kelola global kawasan Arktik saat ini berat pada kepentingan korporasi dan kontestasi geopolitik yang destruktif bagi keberlangsungan kawasan tersebut. Sementara itu, narasi ekologis menjadi fasad justifikasi moral operasi-operasi tersebut. Dinamika ini menegaskan kembali meta-tragedi milik bersama di wilayah Arktik dan sifat konflik interdisiplinernya (Mazurier et. al, 2020).

Arktik sebagai *'Zone of Peace,'* Masihkah?

Di tengah tumpang-tindih kompetisi kepentingan di Arktik, pemaknaan kawasan Arktik sebagai *'zone of peace'* rasanya perlu ditilik kembali. Efek domino dari pidato strategis Gorbachev di awal 1990-an berhasil meredakan ketegangan di kawasan Arktik. Pembangunan konsepsi ini mengubah citra



Arktik yang semula dari kawasan perbatasan militer, menjadi kawasan yang lebih terbuka. Perubahan ini didukung oleh institusionalisasi formal yang semakin memperkuat peran Arktik dalam tata kelola global. Dalam prosesnya, keterlibatan berbagai negara dalam wadah-wadah institusional semakin memperkuat posisi Arktik dalam lanskap internasional.

Pada bagian-bagian sebelumnya telah dipetakan berbagai dinamika para aktor yang berkepentingan berinteraksi di kawasan Arktik. Baik aktor negara maupun non-negara terus berlomba mengeksploitasi sumber daya Arktik. Di sisi lain, aktor-aktor tersebut menggaungkan kekhawatiran atas krisis lingkungan dan membangun narasi kesadaran akan ancaman krisis iklim. Sayangnya, narasi kolektivitas dalam menangani isu perubahan iklim menjadi retorika ironis semata selama Arktik masih diperlakukan sebagai bisnis seperti biasa.

Negara-negara Eropa yang berstatus pengamat permanen di Dewan Arktik seperti Spanyol, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Belanda, dan Polandia menunjukkan dualitas yang mencolok dalam "white papers" publik mereka terkait Arktik. Di satu sisi, mereka dengan tegas menekankan risiko pemanasan global dan menyerukan tanggung jawab kolektif seluruh komunitas untuk melawan ancaman lingkungan. Namun, di sisi lain, semua negara pengamat Eropa menyoroti ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai peluang bisnis yang akan dihadirkan oleh perubahan iklim di masa depan. Dualitas ini secara eksplisit diutarakan salah satunya dalam dokumen pedoman resmi Jerman yang berjudul, "*assume responsibility, seize opportunities*," atau "memikul tanggung jawab, meraih peluang." Narasi ini menunjukkan peralihan dari perlindungan lingkungan ke peluang geo-ekonomi (Steinicke 2014).

Semakin terbukanya kawasan Arktik berarti semakin banyak pula pihak yang ingin mendapat bagian dari kue Arktik. Bagian sebelumnya menyoroti bagaimana negara Asia dan aktor-aktor non-Arktik lainnya mulai terlibat secara aktif dalam dinamika kawasan ini. Menilik dari pendekatan-pendekatan yang diambil, tampak bahwa beberapa negara seperti India,



Korea Selatan, dan Cina menunjukkan bagaimana mereka cenderung meniru pendekatan negara-negara Arktik Utara dalam upaya mereka mengeksploitasi potensi ekonomi kawasan tersebut. Terlebih, partisipasi mereka juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah kehadiran aktor-aktor baru ini akan mengulangi pola-pola eksploitasi yang dilakukan oleh aktor sebelumnya ataukah mereka mampu menawarkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap tata kelola Arktik.

Namun, pendekatan negara-negara Asia masih tampak dibayangi oleh motif ekonomi dan dalam beberapa kasus, terkait dengan militerisasi kawasan. Salah satu contohnya adalah Cina yang telah memulai pembangunan basis-basis militer di pulau-pulau kecil di kawasan Arktik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dinamika kekuatan yang ada tetap beroperasi dalam rezim yang memperkuat ketegangan geopolitik, daripada mendorong pendekatan baru yang lebih inklusif dan kolektif terhadap kawasan Arktik.

Masyarakat Adat yang Selalu Terpinggirkan

Masyarakat adat di Arktik memiliki pandangan yang konsolidatif dalam berbagai isu, khususnya terkait iklim, kekhawatiran militer dan ekonomi, pengetahuan lokal, serta keterlibatan dalam tata kelola. Organisasi-organisasi ini menaungi berbagai kelompok masyarakat adat yang tersebar di wilayah Arktik dan secara aktif mengadvokasikan isu-isu krusial, seperti hilangnya pengetahuan tradisional, bahasa, tradisi, serta hak atas lahan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat adat di kawasan tersebut. Melalui pernyataan yang diajukan dalam forum *Arctic Council Ministerial Meetings* (Dewan Menteri Arktik), komunitas-komunitas ini secara konsisten menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan di Arktik (Fakhoury, 2023).

Meskipun mereka memiliki suara yang kuat dalam mengidentifikasi masalah, peranan masyarakat adat dalam ranah tata kelola Arktik masih termarginalisasi. Dominasi aktor-aktor negara dalam proses pengambilan

keputusan membuat aspirasi dan keluhan masyarakat adat tidak selalu mendapatkan perhatian yang sepadan. Sekretariat Masyarakat Adat yang dibentuk sebagai lembaga untuk mewadahi aspirasi mereka masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi keluhan terkait marginalisasi suara masyarakat adat, utamanya dalam hal dinamika tata kelola Arktik yang masih didominasi aktor-aktor negara. Senasib dengan Dewan Keamanan PBB, Dewan Arktik turut menjadi papan catur geopolitik Amerika Serikat dan koalisi Cina-Russia (Greaves, 2016).

Kendati terdapat dorongan untuk melakukan produksi pengetahuan bersama antara ilmuwan dan masyarakat adat dalam tradisi pengembangan pengetahuan di Arktik, pengetahuan lokal sering kali masih dipandang sebelah mata dibandingkan dengan pengetahuan ilmiah konvensional (Zellen, 2009; Young, 2011; Tamnes and Offerdal, 2014; Greaves, 2016). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola Arktik masih beroperasi dalam kerangka yang belum inklusif.

**Arktik di Persimpangan:
Dominasi, Ekstraktivisme, dan Harapan
Inklusif**

Menyongsong Masa Depan Arktik

Transformasi Arktik dari kawasan terabaikan hingga menjadi arena pergulatan dapat ditrayektori melalui tiga babak dinamika pergeseran wacana tata kelola global. Tiga babak tersebut berpangkal dari inisiasi dan eksplorasi sumber daya, dinamika konfrontasi militer, hingga pasca-unipolarisme yang ditandai oleh fragmentasi kekuatan global. Implikasinya, pemaknaan kawasan Arktik mengalami sejumlah redefinisi. Identitas 'zone of peace' dan ruang kolektif tidak lagi merepresentasikan dinamika kawasan Arktik. Justru, Arktik kini menjadi arena pergulatan geopolitik dengan basis semangat ekstraktivisme, yakni "hubungan berbasis dominasi dengan bumi" (Tracy, 2023).

Eksplorasi Arktik tidak sekadar berorientasi pada konteks geopolitik dan sumber daya. Lebih jauh, ruang kedaulatan masyarakat adat semakin menyempit akibat pengaturan dinamika kawasan yang abai terhadap keterlibatan komunitas lokal. Bahkan, pergulatan negara *superpowers* di tengah semakin menguatnya isu-isu lingkungan, mencerminkan paradoks antara ambisi dan urgensi untuk melindungi keseimbangan ekosistem global.

Proses globalisasi Arktik serta bagaimana maknanya bergeser sejatinya menempatkan kawasan Arktik di dalam radar *superpowers* yang berhasrat meraup keuntungan ekonomi dan geopolitik. Dalam agenda pemenuhan kantong-kantong rakus ini, modal kehancuran alam dan krisis iklim pun bersedia dibayar. Namun, reposisi Arktik juga membuka akses untuk keterlibatan jaringan advokasi global. Kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan di Arktik mulai menyentuh audiens global. Sementara itu, berkembangnya pengetahuan dan kesadaran akan semangat poskolonial dan dekolonial turut merapatkan diri bersama perjuangan masyarakat adat (Standlee, 2006; Young, 2011; Jensen, 2016; Gaulin, 2023).

Masa depan Arktik sangat bergantung pada dinamika produksi dan reproduksi narasi yang menyertainya. Identitas kawasan ini dibentuk oleh bagaimana ia diasosiasikan dan diartikulasikan dalam wacana global. Jika Arktik terus dimaknai sebagai arena pergulatan geopolitik, ruang klaim sumber daya, dan ekspansi kekuasaan, maka konfrontasi militer serta



marginalisasi masyarakat adat akan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Narasi semacam ini memperkuat logika kompetisi eksploitatif yang berisiko mengancam stabilitas kawasan dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, terdapat peluang untuk mereduksi potensi konfrontasi tersebut melalui konstruksi narasi alternatif. Menempatkan Arktik sebagai ruang kolektif yang harus dilindungi, dengan menggantikan logika rezim *zero-sum gain* dengan *absolute gain* yang berfokus pada manfaat bersama, dapat menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Arktik tidak semata-mata dimaknai sebagai medan persaingan kekuasaan, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang memerlukan upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem global dan kedaulatan komunitas lokal.

Pada akhirnya, masa depan Arktik tidak hanya berorientasi pada persoalan geopolitik, ekologi, dan kesejahteraan, melainkan refleksi atas pilihan berbagai aktor dalam memaknai kawasan ini. Dengan kata lain, masa depan Arktik bergantung pada representasi, reproduksi, dan konstitusi identitas oleh aktor dominan. Karenanya, perlawanan terhadap narasi dominan menjadi penting sebagai media kontra-narasi.

Referensi

- Agarwala, N. (2022). India and the Arctic: Evolving Engagements. *Science Diplomacy Review*, 4(2).
- Alexander, E. & Bloom, E. T. (2023, July 27). No. 21 | The Arctic Council and the Crucial Partnership Between Indigenous Peoples and States in the Arctic. Diakses 25 Juni 2024, dari <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/no-21-arctic-council-and-crucial-partnership-between-indigenous-peoples-and-states-arctic>.
- Almazova-Ilyina, A.B., Vinogradov, A.D., Krasnozhenova, E. E., & Eidemiller, K. Yu. (2020). National Interests of Japan and Its Emerging Arctic Policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 539. doi:10.1088/1755-1315/539/1/012048
- Amindoni, A. (2020). Perubahan iklim: Kisah keluarga yang bertahan sendirian di tengah desa yang tenggelam. *BBC News Indonesia*. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51354895>
- Arctic Centre University of Lapland. (2010). *Arctic Indigenous Peoples*. <https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Arctic-Indigenous-Peoples>
- Arctic Council. (n.d.). Canada. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://arctic-council.org/about/states/canada/>
- Arctic Council. (n.d.). History of the Arctic Council Permanent Participants. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://arctic-council.org/news/history-of-the-arctic-council-permanent-participants/>
- Arctic Environmental Protection Strategy. (1991). Arctic Environmental Protection Strategy. Diakses 24 Juni 2024, dari https://library.arcticportal.org/1542/1/artic_environment.pdf
- Arctic Finland. (n.d.). Timeline from the Cold War to the founding of the Arctic Council. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://www.arcticfinland.fi/EN/Stories/Arctic-Era#>
- Arctic Portal. (n.d.). Arctic Council. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://arcticportal.org/arctic-governance/arctic-council>
- Ardhi, M. (2016). Why the Arctic's melting ice is important for Indonesia: The Jakarta Post columnist. *The Straits Times*. Diakses 27 Juli 2024, dari <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/why-the-artics-melting-ice-is-important-for-indonesia-the-jakarta-post-columnist>
- Åtland, K. (2008). Mikhail Gorbachev, the Murmansk Initiative, and the Desecuritization of Interstate Relations in the Arctic. *Cooperation and Conflict*, 43(3), 289-311. <https://doi.org/10.1177/0010836708092838>

- Bennett, M. M. (2014). The Maritime Tiger: Exploring South Korea's Interests and Role in the Arctic. *Strategic Analysis*, 38(6), 886–903. doi:10.1080/09700161.2014.9529
- Bernauer, W. (2018). The Cold War, the Nuclear Arctic, and Inuit Resistance. In *Looking Back and Living Forward* (pp. 3-11). Brill.
- Biagioni, M. (2023). China's Push-in Strategy in the Arctic and Its Impact on Regional Governance. [Commentaries]. *Istituto Affari Internazionali*. <https://www.iai.it/en/pubblicazioni/chinas-push-strategy-arctic-and-its-impact-regional-governance>.
- Bitzinger, A. R. (2020). Singapore: A Tangential but Constructive Player in the Arctic. Dalam Joachim. W (Eds.), *Handbook on Geopolitics and Security in the Arctic: The High North Between Cooperation and Confrontation*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45005-2>.
- Bloom, E. (1999). Establishment of the Arctic Council. U.S. Department of State. Diakses 24 Juni 2024, dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/212368.pdf>.
- Brown, O., Hammill, A., & McLeman, R. (2007). Climate Change as the “New” Security Threat: Implications for Africa. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 83(6), 1141–1154. <https://www.jstor.org/stable/4541915>.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2009). Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory. *Review of International Studies*, 35(2), 253–276. <https://doi.org/10.1017/s0260210509008511>
- Cabinet Office. (2015). Japan's Arctic Policy. Diakses 23 Juli 2024, dari https://www8.cao.go.jp/ocean/english/arctic/pdf/japans_ap_e.pdf
- China Meteorological News Press. (2024, June 4). Do you know the Third Pole? Diakses pada 15 Juli 2024, dari https://www.cma.gov.cn/en/news/NewsEvents/news/202406/t20240604_6314452.html.
- Chuffart, R., Hataya, S., Inagaki, O., & Arthur, L. (2020). Assessing Japan's Arctic Engagement during the ArCS Project (2015–2020). *The Yearbook of Polar Law Online* 12(1), 328-348. https://doi.org/10.1163/22116427_012010020



- Craciun, A. (2009). The Scramble for the Arctic. *Interventions*, 11(1), 103–114. <https://doi.org/10.1080/13698010902752855>.
- Debanck, L. (2024). *Arctic Exceptionalism under Scrutiny A qualitative content analysis of the increasing securitisation in the*. Centre for European Research (CERGU). https://www.gu.se/sites/default/files/2024-04/CERGU%20WP%202%202024_Lena%20Debanck.pdf.
- Denyer, S. (2014, February 16). Kerry calls climate change a weapon of mass destruction, derides skeptics. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/kerry-calls-climate-change-a-weapon-of-mass-destruction-derides-skeptics/2014/02/16/1283b168-971a-11e3-ae45-458927ccedb6_story.html.
- Descamps, M. (2019). The Ice Silk Road: Is China a “Near-Arctic-State”? *Institute for Security & Development Policy*. Diakses 15 Juli 2024, dari <https://www.isdp.eu/publication/the-ice-silk-road-is-china-a-near-arctic-state/#:~:text=Factually%20speaking%2C%20China%20is%20not,or%20water%20in%20the%20Arctic>.
- Dodds, K., & Nuttall, M. (2019). Arctic Homelands. In *The Arctic: What Everyone Needs to Know* (pp. 72–120). Oxford University Press.
- Doshi, R., Dale-Huang, A., & Zhang, G. (2021). Northern expedition: China’s Arctic activities and ambitions. *The Brookings Institute*. <https://www.brookings.edu/articles/northern-expedition-chinas-arctic-activities-and-ambitions/>.
- Duncan, S. (2023, February 23). Not so Poles Apart: The Arctic and the Third Pole in Asia. *The Arctic Institute*. Diakses 15 Juli 2024, dari <https://www.thearcticinstitute.org/not-poles-apart-arctic-third-pole-asia/>.
- Fakhoury, R. (2023). Polar Stars: Toward an Epistemological Understanding of Security Constellations and the Arctic Case. *Global Studies Quarterly*, 3(4), 1–10. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksad058>
- Ferris, E. (2023). *The Securitisation of Energy Russia’s Use of Hydrocarbons in its Foreign Policy since the Ukraine Invasion Occasional Paper*. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. <https://static.rusi.org/russia-energy-security-occasional-paper-nov-23.pdf>.
- Fouche, G. & Dickie, G. (2024, May 24). West, Russia manage limited cooperation in Arctic despite chill in ties. *Reuters*. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://www.reuters.com/world/west-russia-manage-limited-cooperation-arctic-despite-chill-ties-2024-05-14/>.
- Forsythe, L. (2018). Self-Determination Undermined: Education and Self-government. In *Looking Back and Living Forward* (pp. 135–144). Brill.



- Gaulin, N. (2023, April). Arctic governments and fossil fuels. WWF Arctic. <https://www.arcticwwf.org/the-circle/stories/arctic-governments-and-fossil-fuels/>
- Global Arctic Programme. (2014). *Asia in the Arctic*. WWF Global Arctic Programme, 1-24.
- Gomes, T. R. (2022). The Transformation of Arctic Geopolitics and Its Implications for the North Atlantic. *Policy Brief Issue 14*. Atlantic Centre.
- Gorbachev, M. (1987). Speech in Murmansk on the Occasion of the Presentation of the Order of Lenin and the Gold Star to the City of Murmansk. Diakses 23 Juni 2024, dari https://www.barentsinfo.fi/docs/Gorbachev_speech.pdf
- Government of Northwest Territories. (n.d.). *Understanding Aboriginal and Treaty Rights in the Northwest Territories: An Introduction*.
- Greaves, W., & Pomerants, D. (2017). “Soft Securitization”: Unconventional Security Issues and the Arctic Council. *Politik*, 20(3). <https://doi.org/10.7146/politik.v20i3.97152>.
- Gricius, G. (2021, June 17). The Arctic’s Securitization. *Inkstick*. Diakses 23 Juli 2024, dari <https://inkstickmedia.com/the-arctics-securitization/>.
- Hamilton, J. D. (1994). *Arctic revolution: Social change in the Northwest Territories, 1935-1994*. Dundurn Press.
- Hanaček, K., Kröger, M., Scheidel, A., Rojas, F., & Martinez-Alier, J. (2022). On thin ice – The Arctic commodity extraction frontier and environmental conflicts. *Ecological Economics*, 191, 107247. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107247>
- Hird, M. (2016). The dew line and Canada’s Arctic waste: legacy and futurity. *Northern Review*, (42), 23-45.
- Heininen, L., Everett, K., Padrtova, B. & Reissell, A. (2020). Arctic Policies and Strategies— Analysis, Synthesis, and Trends. International Institute for Applied Systems Analysis.
- Heng, C. & Freymann, E. (2023, July 7). Outsiders Wanting In: Asian States and Arctic Governance. *Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs*. Diakses pada 15 Juli 2024, dari <https://www.belfercenter.org/publication/outside-wanting-asian-states-and-arctic-governance>.
- Holtsmark, S. G., & Tamnes, R. (2014). The geopolitics in the Arctic in historical perspective. In R. Tamnes & K. Offerdal (Eds.), *Geopolitics and security in the Arctic. Regional dynamics in a global world* (pp. 12–48). London: Routledge.



- Hossain, K. (2016). Securitizing the Arctic indigenous peoples: A community security perspective with special reference to the Sámi of the European high north. *Polar Science*, 10(3), 415–424. <https://doi.org/10.1016/j.polar.2016.04.010>.
- Houghton, J. (2003, July 28). Global warming is now a weapon of mass destruction. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/politics/2003/jul/28/environment.gre-enpolitics>.
- Humpert, M. (2011, September 15). The Future of the Northern Sea Route - A “Golden Waterway” or a Niche Trade Route. *The Arctic Institute*. Diakses 27 Juli 2024, dari <https://www.thearcticinstitute.org/future-northern-sea-route-golden-waterway-niche/>
- Hyde, C. C. (1933). The Case Concerning the Legal Status of Eastern Greenland. *American Journal of International Law*, 27(4), 732–738. <https://doi.org/10.2307/2190118>
- India’s Arctic Policy: Building A Partnership for Sustainable Development. (2022). *Government of India*.
- Jensen, L. (2016.). Approaching a Postcolonial Arctic. *Postkolonial Temaserie*, 14, 49-65.
- Jin, D., Seo, W., & Lee., S. (2017). Arctic Policy of the Republic of Korea. *Ocean and Coastal Law Journal* 22(1), 85-96.
- Josephson, P. R. (2014). *The conquest of the Russian Arctic*. Harvard University Press.
- Junida, A. I. (2019, Mei 15). Kemenko Maritim inisiasi usulan jadi pengamat tetap Dewan Arktik. *Antara News*. Diakses 27 Juli 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/871767/kemenko-maritim-inisiasi-usulan-jadi-pengamat-tetap-dewan-arktik>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Indonesia-Denmark Bilateral Cooperation. Diakses 27 Juli 2024, dari https://www.kemlu.go.id/copenhagen/en/pages/hubungan_bilateral_ri-denmark/5660/etc-menu
- Kemenkomarves. (2019, Mei 15). Ingin Akses dalam Riset Perubahan Iklim, Pemerintah Inisiasi Usulan Menjadi Pengamat Tetap Dewan Arktik. Diakses 27 Juli 2024, dari <https://maritim.go.id/detail/ingin-akses-dalam-riset-perubahan-iklim-pemerintah-inisiasi>
- Kulchyski, P., & Bernauer, W. (2014). Modern treaties, extraction, and imperialism in Canada’s indigenous north: Two case studies. *Studies in Political Economy*, 93(1), 3-24.
- Kulik, A., Kulik, S. V., Lagutin, O. V., & Chistalyova, T. (2020). Comparative analysis of China’s and Singapore’s policies in the Arctic. *IOP*



Conference Series: Earth and Environmental Science, 539(1), 012040.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/539/1/012040>.

Körber, L.-A., MacKenzie, S., & Westerståhl Stenport, A. (Eds.). (2017). *Arctic Environmental Modernities*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-39116-8>

Krasnozhenova, E. E., Kulik, S. V., & Lokhova, T. V. (2020). Arctic transportation systems during World War II. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 434(1), 012002.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/434/1/012002>

Lanteigne, M. (2016). *Ties that Bind: The Emerging Regional Security Complex in the Arctic*. JSTOR; Norwegian Institute for International Affairs (NUPI). <https://www.jstor.org/stable/resrep08010>

Laruelle, M. (2019). Postcolonial polar cities? New indigenous and cosmopolitan urbanness in the Arctic. *Acta Borealia*, 36(2), 149–165.
<https://doi.org/10.1080/08003831.2019.1681657>.

Madwar, S. (2018, July 25). Inuit High Arctic Relocations in Canada. The Canadian Encyclopedia.
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-high-arctic-relocations>

Mazurier, P. A., Delgado-Morán, J. J., & Payá-Santos, C. A. (2019). The Meta-Tragedy of the Commons. Climate Change and the Securitization of the Arctic Region. In J. M. Ramírez & J. Biziewski (Eds.), *Security and Defence in Europe* (pp. 63–74). Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12293-5_5

Mikkelsen, A., & Langhelle, O. (2008). *Arctic Oil and Gas: Sustainability at Risk?* (1st ed.). Routledge.

Miller, E. E. (2019). *Empire of Ice: Arctic Natural History and British Visions of the North, 1500-1800* [Dissertation].
<https://conservancy.umn.edu/server/api/core/bitstreams/c6ac6076-c49f-498f-90c6-e61e7ca7da4a/content>

Miyaoka, H. (n.d.). Promoting close collaboration for Arctic studies by Japanese and international researchers. Diakses 27 Juli 2024, dari https://www.nipr.ac.jp/english/collaborative_research/arctic.html

Moe, A. & Stokke, O. S. (2019). Asian Countries and Arctic Shipping: Policies, Interests and Footprints on Governance. *Arctic Review on Law and Politics* 10, 24–52.

Nanda, D. (2019). India's Arctic Potential. *Observer Research Foundation*. ISBN: 978-93-88262-86-6.

NIPR. (2021). Project Overview – About ArCS II. Diakses 23 Juli 2024, dari <https://www.nipr.ac.jp/arcs2/e/about/>

- Nowak, M. (2014). The Hot Struggle Over the Cold Waters: The Strategic Position of the Arctic Region During and After the Cold War. *West Virginia University* [Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports]. <https://researchrepository.wvu.edu/etd/497>.
- Nugroho, P. M. P., Farikhah, J. A., Fahira, P. A., Adjipersadani, G., Nafila, A. L., & Muttaqien, M. (2022). Analisis Strategi Arktik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktik. *Jurnal Hubungan Internasional* 2, 253-273. DOI: 10.20473/jhi.v15i2.38987
- Ocean Policy Research Institute. (2017). Japan's Future Priority Areas of Arctic Policy. Diakses 23 Juli 2024, dari <https://www.spf.org/en/opri/projects/arctic.html>
- Osica, O. (2010). 'The High North as a New Area of Cooperation and Rivalry'. In *Nowa Europa. Natolin Review* - Special issue 4, No. 1. Diakses pada 18 Agustus 2024, dari http://www.natolin.edu.pl/pdf/nowa_europa/NE_spec42010_eng.pdf
- Padrtová, B. (2017). *Securitization of the Arctic: U.S. Securitizing Actors and Their Strategies* (pp. 44–53) [Dissertation]. https://is.muni.cz/th/o6uon/Padrtova_PhD_thesis_FINAL.pdf
- Parfitt, T. (2007, August 2). Russia plants flag on North Pole seabed. *The Guardian*. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://www.theguardian.com/world/2007/aug/02/russia.arctic>.
- Park, Y. K. (2014). South Korea's Interests in the Arctic. *Asia Policy* 18(1), 59–65. doi:10.1353/asp.2014.0031
- Pelaudeix, C. (2012). Inuit Governance in a Changing Environment: A Scientific or Political Project? In C. Pelaudeix, R. Griffiths, & A. Faure (Eds.), *What Holds the Arctic Together?* (pp. 67–83). Editions L'Harmattan.
- Plaut, S. (2012). "Cooperation is the story" – best practices of transnational indigenous activism in the North. *The International Journal of Human Rights*, 16(1), 193–215. <https://doi.org/10.1080/13642987.2011.630498>
- Probotrianto, A. F. (2021). Masyarakat Adat dan Diskursus Representasi di Lingkar Artik: Tinjauan Kosmopolitanisme dan Geopolitik Kritis. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19621>
- Puranen, M., & Kopra, S. (2023). China's Arctic Strategy – a Comprehensive Approach in Times of Great Power Rivalry. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 6(1), 239–253. <https://doi.org/10.31374/sjms.196>.



- Relli, S. (2024, September 16). The Sad History of Canada's Inuit High Arctic Relocations. *TheCollector*. <https://www.thecollector.com/inuit-high-arctic-relocations/>
- Rosamond, B. A. & Rosamond, B. (2015). New Political Community and Governance at the Top of the World. Dalam Catarina, K & Ted, S (Eds.), *Governing Borders and Security: The Politics of Conectivity and Dispersal*. Routledge. ISBN: 978-0-203-76220-2.
- Rosen, K. R. (2022, December 17). A Battle for the Arctic Is Underway. And the U.S. Is Already Behind. *Politico*. Diakses 23 Juni 2024, dari <https://www.politico.com/news/magazine/2022/12/17/climate-change-arctic-00071169>.
- Runfola, D. et al. (2020) geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLoS ONE* 15(4): e0231866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866>.
- Saami Council, & German Arctic Office at the Alfred Wegener Institute. (2021). *Arctic Indigenous Peoples*. <https://lcipp.unfccc.int/sites/default/files/2022-06/Arctic%20Indigenous%20Peoples.pdf>
- Şahin, S. B., & Çetiner, Ö. (2024). NATO's Securitization of Climate Change in the Arctic. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 20(47). <https://doi.org/10.17752/guvenlikstrjtj.1430911>
- Schmitz, N., Barnes, D. P., Coates, A. J., Griffiths, A., Hauber, E., Jaumann, R., ... & Trauthan, F. (2008, November). ExoMars PanCam Field Test Report from the Arctic Mars Analogue Svalbard Expedition (AMASE) 2008. In the 10th Workshop on Advanced Space Technologies for Robotics and Automation (ASTRA).
- Serreze, M. C. (2018). *Brave new Arctic: The untold story of the melting North*. Princeton University Press.
- Sharma, A. (2021, Oktober 25). China's Polar Silk Road: Implications for the Arctic Region. *Journal of Indo-Pacific Affairs*. Diakses pada 15 Juli 2024, dari <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2820750/china-polar-silk-road-implications-for-the-arctic-region/>.
- Sharma, B. (2023, May 24). "Securitization of the Arctic" post Finland's Accession to NATO. *Russian International Affairs Council*. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://russiancouncil.ru/en/analytcs-and-comments/columns/arctic-cooperation/securitization-of-the-arctic-post-finland-s-accession-to-nato/>.
- Shiblee, M. A., & Rashid, M. (2021). Geopolitics of the Arctic: Through the Lens of State Securitization. *Journal of Global Politics and Current Diplomacy*, 9(1), 52-62.



- Simon-Ekeland, A. (2024). Dreams of Arctic flights. *Lychnos Årsbok För Idé- Och Lärdomshistoria*. <https://doi.org/10.48202/24816>
- Singarimbun, L. A. S. (2022). Analyzing the Development Cooperation between Indonesia and Denmark in Developing a Circular Economy. *Journal of World Trade Studies* 7 (1), 49-59.
- Singh, M. (2024, January 9). India in the Arctic: Legal Framework and Sustainable Approach. *The Arctic Institute*. Diakses 15 Juli 2024, dari <https://www.thearcticinstitute.org/india-arctic-legal-framework-sustainable-approach/>.
- Standlea, D. M. (2006). *Oil, globalization, and the war for the Arctic refuge*. SUNY Press.
- Stotts, J. (2017). The politics of Arctic sovereignty: Oil, ice, and Inuit governance. *The Polar Journal*, 7(2), 421–423. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2017.1382231>
- Storey, I. (2016). Singapore and the Arctic: Tropical Country, Arctic Interests. In V. Sakhuja & K. Narula (Eds.), *Asia and the Arctic: Narratives, perspectives and policies*. Springer.
- Storey, I. (2014). The Arctic Novice: Singapore and the High North. *Asia Policy*, 1(1), 66–72. <https://doi.org/10.1353/asp.2014.0034>.
- Stronski, P., & Ng, N. (2018). *Cooperation and Competition | Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and the Arctic | The Arctic* (pp. 25–31). Carnegie Endowment for International Peace. <http://www.jstor.com/stable/resrep16975.9>.
- Stutzman, C. D., Nelson, D. M., & Stonehouse, B. (1987). Cancer incidence and risk in Alaskan natives exposed to radioactive fallout. In *Arctic Air Pollution* (pp. 229–238). chapter, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stuhl, A. (2016). *Unfreezing the Arctic : science, colonialism, and the transformation of Inuit lands*. The University Of Chicago Press.
- Tamnes, R., & Offerdal, K. (2014). Conclusion. In R. Tamnes & K. Offerdal (Eds.), *Geopolitics and security in the Arctic: Regional dynamics in a global world* (pp. 167–177). London: Routledge.
- Teeple, N. (2021). *Great Power Competition in the Arctic*. Network for Strategic Analysis, policy report.
- The Arctic Institute. (n.d.). South Korea. Diakses 25 Juli 2024, dari <https://www.thearcticinstitute.org/country-backgrounders/south-korea/>
- The Saami Council. (n.d.). About the Saami Council. *The Saami Council*. <https://www.saamicouncil.net/en/the-saami-council>



- The State Council Information Office of the People's Republic of China. (2018). *Full text: China's Arctic Policy* | *english.scio.gov.cn*. English.scio.gov.cn. http://english.scio.gov.cn/2018-01/26/content_50313403.htm.
- The White House. (2013). *National Strategy for the Arctic Region*. Whitehouse.gov. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf.
- Toivanen, R. (2019). European Fantasy of the Arctic Region and the Rise of Indigenous Sámi Voices in the Global Arena. In N. Sellheim, Y. V. Zaika, & I. Kelman (Eds.), *Arctic Triumph* (pp. 23–40). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05523-3_3
- Tonami, A. (2014). The Arctic Policy of China and Japan: Multi-Layered Economic and Strategic Motivations. *The Polar Journal* 4(1), 105–126, <http://dx.doi.org/10.1080/2154896X.2014.913931>
- Townsend, J., & Kendall-Taylor, A. (2021). Back to the Future: The Origins of Great-Power Competition in the Arctic. *Center for a New American Security*.
- Tracy, E. F. (2023, April). Extractivism is damaging Arctic ecosystems and warming the global climate. Arctic WWF. <https://www.arcticwwf.org/the-circle/stories/extractivism-is-damaging-arctic-ecosystems-and-warming-the-global-climate/>
- Uarctic. (n.d.). Korea Polar Research Institute. Diakses 26 Juli 2024, dari <https://www.uarctic.org/members/member-profiles/non-arctic/28245/korea-polar-research-institute>
- United Nations. (1958). *United Nations Yearbook: DISARMAMENT AND OTHER MATTERS CONCERNING MAINTENANCE OF PEACE AND SECURITY*.
- U.S. Geological Survey. (2008). *Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle*. <https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf>
- US wary of China-Russia cooperation in increasingly strategic Arctic. (2024, July 23). *Al Jazeera*. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/23/us-wary-of-china-russia-cooperation-in-increasingly-strategic-arctic>.
- Wang, M. L. (2020, September 25). 全球变暖北极海冰或将消失[Global warming Arctic sea ice may disappear]. *中国气象报 [China Meteorological News]*.
- Wang, Y., & Xu, L. (2022). *CHINA AND THE SECURITIZATION OF THE ARCTIC: CLIMATE CHANGE AND ENERGY SECURITY*. Tampere University. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/147733/Assessing_China_s_Securitization.pdf?sequence=1.



Wood, P., Alex, S., & Lee, A. T. (2021). China's ground segment building the pillars of a great space power. *China Aerospace Studies Institute*. ISBN 9798710347652.

World Bank Group & Asian Development Bank. (2021). Climate Risk Country Profile: Indonesia. Diakses pada 26 Juli 2024, dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>

Young, O. R. (2011). The future of the Arctic: cauldron of conflict or zone of peace?. *International Affairs*, 87(1), 185-193.

Young, O.R. (2019). Constructing the "New" Arctic: The Future of the Circumpolar North in a Changing Global Order. *Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law* 12 (5), 6-24. DOI: 10.23932/2542-0240-2019-12-5-6-24

Zellen, B. S. (2009). Arctic Doom, Arctic Boom: The Geopolitics of Climate Change in the Arctic. ABC-CLIO.

Penulis

Wendi Wiliyanto memiliki minat pada pendekatan postkolonialisme dalam upaya re-definisi dan re-evaluasi tata kelola global dominan. Ketertarikannya mencakup isu-isu politik pembangunan, lingkungan, feminisme, dan peran *middle powers*. Saat ini, Wendi aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian, termasuk *Advancing Circular Education for Sustainable Transformation* dan *Feminist Participatory Action Research*. Wendi dapat dihubungi melalui: wendiwiliyanto@mail.ugm.ac.id.

Anggita Fitri Ayu Lestari bekerja sebagai Staf Media Officer di Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan topik penelitian yang berkaitan dengan isu *soft power*, *development studies*, serta *Japanese Studies*. Selama jabatan sebelumnya, Anggita bekerja sebagai asisten dosen untuk beberapa mata kuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Anggita dapat dihubungi melalui: anggitafitri77@gmail.com.

Tria Nadila Desanti Margono saat ini bekerja sebagai Koordinator Publikasi di Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada. Ia bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan publikasi institut, menjalin kemitraan strategis terkait publikasi, serta mengelola *Global South Review*, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada isu *Global South*. Minat penelitiannya mencakup isu-isu politik dan keamanan global, keamanan siber, serta sosiokultural, dengan pendekatan konstruktivisme. Dila dapat dihubungi melalui: trianadila@mail.ugm.ac.id.

Cornelia Laras Gigih Kineta memiliki minat penelitian pada tata kelola digital, politik lingkungan, serta studi gender, bertumpu pada pendekatan dekolonial dan interseksional. Saat ini Laras terlibat dalam beberapa penelitian, antara lain menjadi peneliti utama pada *Quantifying Environmental Impacts in Indonesia's Energy Transition* dan asisten peneliti dalam *Advancing Circular Education for Sustainable Transformation*. Laras dapat dihubungi melalui: laraskineta@gmail.com.



Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
iis.fisipol@ugm.ac.id | +62 274 563362 EXT. 115 | +62 87884607707

